



RENCANA KERJA DINAS PERIKANAN

@
aaaaa
aaaaaaaaa
aaaaa
@

TAHUN 2023

@
aaaaa
aaaaaaaaa
aaaaa
@

DINAS PERIKANAN KABUPATEN TABANAN
Jl. Pulau Nias Nomor 33 Tabanan Telp/Fax (0361) 811497
2022

KATA PENGANTAR

Buku Rencana Kerja (Renja) pada Dinas Perikanan Kabupaten Tabanan Tahun 2023 ini disusun untuk melaksanakan UU Nomor : 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan sebagai penjabaran lebih lanjut dari rancangan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan Kabupaten Tabanan dan Rancangan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026, yaitu dalam rangka penyelenggaraan Manajemen Pemerintahan dan Pembangunan yang berdaya guna dan berhasil guna serta untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Tabanan Tahun 2023 ini disusun sesuai dengan hasil musrenbang, forum OPD, dan hasil kajian partisipatif dan teknokratik yang diselaraskan dengan Renstra Dinas Perikanan tahun 2021-2026.

Kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan buku Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Tabanan Tahun 2023 ini, kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Semoga buku ini dapat bermanfaat untuk pembangunan urusan kelautan dan perikanan di Kabupaten Tabanan.

Tabanan, 23 Juni 2022

Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten Tabanan



I MADE YUDIANA, ST., M.T
Pembina Utama Muda
NIP. 19690619 199803 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.4 Sistematika Penulisan.....	4
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN	
LALU.....	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	6
2.1.1 Capaian Program dan Kegiatan.....	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	14
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	14
2.4 Penelaan Ranwal RKPD	
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	18
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	21
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional.....	21
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	22
3.3 Program dan Kegiatan Prioritas.....	26
3.4 Forum OPD	
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT	
DAERAH.....	27
4.1 Rancangan Penganggaran dan Kinerja.....	27
4.2 Sasaran Program dan Kegiatan.....	30
BAB V PENUTUP.....	32
5.1 Kesimpulan.....	32
5.2 Langkah Antisipatif.....	32
LAMPIRAN	



I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masyarakat daerah sudah sangat peduli akan pembangunan daerahnya, sehingga pemerintah pusat dan daerah serta stakeholder sudah harus berpikir visioner dalam perencanaan pembangunan. Perencanaan nasional secara terus menerus mengalami penyempurnaan, sehingga RPJMP tahun 2019-2024 harus diaktualisasikan secara sinergis dari pusat, provinsi dan kabupaten/kota

Peta birokrasi di Indonesia kini dipaksa untuk digeser agar berjalan sesuai dengan pakemnya. Pemerintah berupaya merumuskan sebuah peraturan agar menjadi landasan pelaksanaan reformasi birokrasi dengan mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2011 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Indonesia Tahun 2010-2025. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan *good and clean government* yang telah ditetapkan melalui percepatan implementasi reformasi birokrasi. Dengan demikian, pemerintah melakukan penataan kembali terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah, di mana birokrasi akan menjadi tulang punggung perubahan.

Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tabanan terus berupaya melakukan penyempurnaan tata kelola pemerintahan yang baik, karena derasnya tuntutan pemerintah pusat, daerah, maupun masyarakat yang menginginkan *good government* dan pelayanan prima. Oleh karena itu Dinas Perikanan berupaya mengelola potensi sumber daya perikanan yang ada agar pembangunan dapat berdaya saing dan berkelanjutan.

Kabupaten Tabanan dengan luas wilayah 839,33 km², dikenal sebagai “Lambung Berasnya Daerah Bali”. Ditinjau dari aspek ketersediaan sumber daya lahan, kondisi hidrologi, klimatologi dan fisiologi lahan, selain sebagai lumbung beras, Kabupaten Tabanan juga memiliki potensi yang cukup besar bagi pembangunan perikanan budidaya air tawar. Pemanfaatan potensi sumber daya perikanan di Kabupaten Tabanan sudah memberikan kontribusi pada peningkatan konsumsi ikan masyarakat yaitu sebesar 31,49 kg/kapita/tahun di tahun 2020 meningkat di tahun 2021 mencapai 3,67 kg/kapita/tahun. Peningkatan konsumsi masyarakat tidak terlepas dari sinergisitas pemerintah, swasta, dan masyarakat, baik di sektor hulu yang memproduksi berbagai jenis ikan, di sektor agroindustri yang memproduksi aneka olahan hasil perikanan, dan di sektor hilir yang mempromosikan dan memasarkan produk ke konsumen. Adapun kinerja pelaku utama perikanan tersebut dilakukan melalui :

- a. Pengembangan agribisnis perikanan budidaya oleh 516 kelompok pembudidaya ikan di kolam untuk komoditas lele, nila, karper, gurame, udang galah, patin, dan ikan hias, di sawah (minapadi dan penyelang) untuk komoditas ikan karper, di saluran irigasi untuk komoditas ikan karper, dan di keramba jaring apung untuk komoditas ikan nila.



- b. Pengelolaan agribisnis penangkapan ikan di laut oleh 78 Kelompok Usaha Bersama Nelayan dan di perairan umum (sungai dan danau) oleh 1.813 rumah tangga nelayan.
- c. Peningkatan daya saing produk aneka olahan hasil perikanan oleh 63 kelompok pengolah hasil perikanan.
- d. Pelestarian sumber daya hayati dilakukan oleh 11 kelompok masyarakat pengawas swakarsa baik pelestarian sumber daya biota perairan pesisir, sungai, dan danau.

Derasnya arus persaingan usaha perikanan mendorong pelaku utama perikanan dan pelaku usaha dituntut kreatif dan inovatif dalam menghasilkan produk yang berdaya saing dan bernilai tambah lebih tinggi. Dinas Perikanan dituntut mampu memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat binaanya agar mampu bersaing di pasar yang semakin kompetitif sekarang ini.

Potensi Kabupaten Tabanan di urusan Kelautan dan Perikanan cukup besar baik di bidang perikanan budidaya air tawar, perikanan tangkap di laut dan perairan umum, pengolahan ikan, pemasaran produk perikanan, dan garam rakyat. Dinas Perikanan yang mengemban tugas teknis di urusan Kelautan dan Perikanan telah menetapkan strategi dalam pembangunan perikanan dengan mempertimbangkan isu-isu strategis yang dihadapi sehingga dapat melakukan inovasi program dan kegiatan prioritas. Adapun isu strategis yang dihadapi dan prioritas ditangani di tahun 2021 yaitu : 1). Pengelolaan perikanan budidaya dalam penyediaan benih unggul, serangan penyakit ikan, dan harga pakan buatan (pellet) yang terus meningkat. 2) Pengelolaan perikanan tangkap dalam motorisasi armada tangkap dan diversifikasi alat tangkap ramah lingkungan. 3). Pengelolaan nilai tambah produk perikanan dalam menghasilkan aneka olahan ikan berdaya saing di pasar lokal dan modern. 4). Pengelolaan sumber daya hayati perikanan yang terus menurun stock biota perairannya akibat pencemaran perairan dan tindakan perusakan biota perairan, dan 5). Pengaruh pandemi covid-19 di bidang perikanan.

Komitmen pemerintah daerah dalam pembangunan merupakan modal dasar dalam pelaksanaan RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Dinamika pembangunan mendorong pemerintah Kabupaten Tabanan untuk terus aktif dan kreatif dalam mengatasi isu-isu strategis daerah yang memerlukan penanganan secara terpadu. Pemerintah Kabupaten Tabanan sangat mendukung program pusat khususnya program Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu : pengentasan kemiskinan (*pro poor*), penciptaan lapangan kerja (*pro job*), dan percepatan pertumbuhan ekonomi (*pro growth*).

Dokumen Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Tabanan bersifat jangka pendek dan menengah namun tetap diletakkan pada jangkauan jangka panjang dan mengacu kepada visi dan misi Bupati Tabanan sehingga rumusan visi, misi dan arah kebijakan pembangunan bidang perikanan dan kelautan untuk lima tahun mendatang dapat bersinergi dengan arah pembangunan Bupati sebagai Kepala Daerah terpilih.



Untuk mewujudkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program dalam Renstra ini, maka setiap tahunnya akan dibuat Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) secara proporsional dan terukur serta menentukan jenjang tanggungjawab terhadap keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaannya antara lain : Staf dan eselon IV bertanggungjawab pada kegiatan, Eselon III bertanggungjawab pada program, dan Eselon II bertanggungjawab pada kebijakan.

Dalam menyusun Renja Dinas Perikanan Kabupaten Tabanan, ada beberapa hal yang mendapat perhatian seperti : (a) Tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Tabanan, (b) Capaian kinerja tahun sebelumnya, (c) Permasalahan yang diprediksi muncul pada tahun mendatang dan (d) Indikasi alokasi dana yang diperkirakan pada tahun-tahun mendatang.

Dinas Perikanan sebagai bagian dari Pemerintah Kabupaten Tabanan sesuai tufoksinya berupaya mewujudkan Tabanan Serasi. Agenda pokok itu dijabarkan dalam rencana tahunan melalui proses teknokratik (kajian ilmiah berdasarkan analisis masalah, potensi, daya saing daerah, dan forum OPD) dan proses partisipatif melalui media Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mulai di tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten.

Berpijak dari dinamika pembangunan dan penganggaran daerah di adaptasi tatanan kehidupan baru kedepan, dan untuk menjalankan amanat Undang Undang, maka Dinas Perikanan setelah merumuskan hasil musrenbang dan forum OPD dilanjutkan menyusun Renja Tahun 2023.

1.2 Dasar Hukum

Landasar legal formal dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Tahun 2023 ini adalah :

1. Landasarn idiil yaitu Pancasila.
2. Landasan konstitusional yaitu UUD 1945
3. Landasan operasional antara lain :
 - a. UU Nomor : 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
 - b. UU Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
 - e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara



- Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RJPMD) Kabupaten Tabanan 2005-2025.
 - h. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
 - i. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJPMD) Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026.
 - j. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 52 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan.
 - k. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 40 Tahun 2019 tentang Manajemen Risiko.
 - l. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 42 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Semesta Berencana.
 - m. Keputusan Bupati Tabanan Nomor 180/383/03/HK/2022 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja dan Anggaran dan Rencana Kerja pada Dinas Perikanan Tahun 2022.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Perikanan Tahun Anggaran 2023 ini adalah :

1. Sebagai acuan bagi perangkat daerah dalam melaksanakan tugas pokok di urusan pilihan kelautan dan perikanan.
2. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan tahun kelima dari Rencana Strategis Tahun 2016-2021 yang memuat rancangan target kinerja pembangunan dalam mendukung pencapaian visi dan misi Pimpinan Daerah yang tertuang dalam RPJMD Semesta Berencana tahun 2016-2021.
3. Sebagai dasar dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA) tahun 2023.

1.4 Sistematika Penulisan

Sesuai dengan amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka



Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada Pasal 129 menyatakan “Hasil perumusan rancangan awal Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128, disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:

- a. Pendahuluan;
- b. Hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
- c. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
- d. Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
- e. Penutup

Adapun isi ringkas atas rencana kerja perangkat daerah dapat diuraikan sebagai berikut :

- Bab I. Pendahuluan : Pada bagian ini memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan rencana kerja dinas.
- Bab II. Hasil Evaluasi : Pada bagian ini memuat evaluasi pelaksanaan renja dinas
Evaluasi Renja tahun lalu dan capaian renstra dinas tahun lalu, analisa
Perangkat Daerah kinerja pelayanan dinas, isu-isu penting penyelenggaraan
Tahun Lalu tugas dan fungsi dinas, rewi terhadap rancangan awal
RKPD, dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.
- Bab III. Tujuan dan : Pada bagian ini memuat telaah terhadap kebijakan
Sasaran Perangkat nasional, tujuan dan sasaran renja dinas, program dan
Daerah kegiatan.
- Bab IV. Rencana : Pada bagian ini memuat rencana kerja, indikator kinerja,
Kerja dan Pendanaan dan pendanaan, serta sasaran kegiatan.
Perangkat Daerah
- Bab V. Penutup : Pada bagian ini memuat catatan penting yang perlu
mendapat perhatian dan rencana tindak lanjut

II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.1.1 Capaian Program dan Kegiatan

Dinas Perikanan di TA 2021 mengusulkan anggaran untuk 5 program prioritas dan yang mendapat dukungan anggaran di 5 program prioritas mendukung pencapaian IKU. Adapun capaian kinerja sasaran disajikan seperti tabel berikut ini.

Tabel 2.1 Capaian kinerja sasaran tahun 2017-2021

Tujuan	Sasaran	IKU	Realisasi/tahun					Sat
			2017	2018	2019	2020	2021	
Terwujudnya optimalisasi pengembangan potensi perikanan	Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Prosentase peningkatan produksi perikanan budidaya	1,39	2,79	0,94	0,82	0,19	%
	Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Prosentase peningkatan produksi perikanan tangkap	0,77	3,18	3,86	3,97	0,30	%
	Meningkatnya produksi produk olahan perikanan	Prosentase peningkatan produksi produk olahan hasil perikanan	4,67	1,85	1,78	0,31	2,30	%
Meningkatnya kinerja Dinas Perikanan yang akuntabel	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai LkjIP	BB	A	A	BB	A	-

Sumber : Laporan IKP, 2021

Kebijakan penganggaran tingkat perangkat daerah telah melalui hasil analisis atas capaian target kinerja, permasalahan dan upaya yang sudah dilakukan dan implikasi yang ditimpulkan atas kebijakan yang dilaksanakan.

Kabupaten Tabanan dalam RPJMD Semesta Berencana Tahun 2021-2026 dalam penjabaran misinya berfokus pada pangan, sandang, papan. Pembangunan perikanan diupayakan untuk memberikan pelayanan kepada stakeholder sesuai amanah Peraturan Bupati Tabanan Nomor 21 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan. Pelayanan diberikan agar kontribusinya pada Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) kabupaten terus meningkat.

1. Pemberdayaan Pembudidaya Ikan

Sebagai penjabaran misi pemerintah daerah yang berfokus pada pangan, sandang, papan, maka Dinas Perikanan di Kabupaten tabanan dengan potensi terbesar pada pengembangan perikanan budidaya diharapkan mampu menghasilkan produk unggulan

daerah. Upaya pelayanan yang sudah dilakukan dalam penyediaan sarana dan prasarana pokok dan pendukung yaitu:

a. Penyediaan benih ikan bermutu

Pelayanan akan benih ikan didukung oleh 4 unit Balai Benih Ikan (BBI lokal), 1 unit Rural Credit Project (RCP), 3 unit Kolam Pembenihan Ikan (KPI) dan 42 Unit Perbenihan Ikan Rakyat (UPR) yang keberadaannya tersebar di 10 Kecamatan yang kesemuanya selalu dibina dan diawasi oleh dinas dalam upaya menghasilkan benih bermutu dan jelas ketelusurannya. Adapun produksi benih yang diserap pasar seperti di bawah ini.

Tabel 2.2 Produksi benih ikan

Tahun	Produksi (ekor)	Komoditas	Produsen benih
2016	13.316.700	Nila, lele, karper, gurame, kodok	BBI, UPR
2017	15.500.000	Nila, lele, karper, gurame, kodok	BBI, UPR
2018	16.010.000	Nila, lele, karper, gurame, kodok	BBI, UPR
2019	15.600.000	Nila, lele, karper, gurame, kodok	BBI, UPR
2020	16.407.000	Nila, lele, karper, gurame, kodok	BBI, UPR
2021	16.780.000	Nila, lele, karper, gurame, kodok	BBI, UPR

Sumber : Laporan Tahunan UPTD, 2021

b. Pengembangan budidaya ikan air tawar

Produksi ikan konsumsi diusahakan di kolam, sawah/penyelang, saluranirigasi, kolam deras dan keramba jarring apung. Hasil analisis lima tahunan menunjukkan produksi berfluktuasi karena pengaruh agroklimat tidak sepenuhnya dapat dimanipulasi dengan teknologi adaptif dalam budidaya ikan. Adapun perkembangan produksi ikan di kolam seperti di bawah ini.

Tabel 2.3 Produksi ikan konsumsi air tawar

Sumber produksi	Luas lahan/ ha	Produksi / tahun / ton				
		2017	2018	2019	2020	2021
Kolam	27,63	3.213,4	3.284,60	2.980,64	2.928,46	2.896,51
Sawah	44,28	70,1	73,30	64,94	139,12	184,19
S. irigasi	2,94	27,1	29,04	22,82	27,16	14,55
KJA	0,25	3,8	3,39	2,88	1,68	7,11
Jumlah	75,00	3.314,4	3.390,3	3.071,3	3.096,4	3.102,36

Sumber : Perikanan Dalam Angka, 2021

2. Pemberdayaan Nelayan

Kabupaten Tabanan memiliki potensi yang cukup besar dalam pengembangan perikanan tangkap di laut yang dilakukan oleh nelayan skala kecil yang tersebar di 12 desa pesisir di sepanjang garis pantai 34,4 km. Semua nelayan sudah terdaftar dalam Kelompok Usaha Bersama (KUB) sehingga memudahkan dalam pembinaan, pemberian sarana dan prasarana, dan pengawasan hasil tangkapan.

Penangkapan ikan ramah lingkungan di perairan umum (sungai dengan luas 408 ha dan danau seluas 337 ha) dilakukan oleh nelayan skala kecil yang tersebar di 10 kecamatan dengan alat tangkap pancing, bubu, dan jala. Adapun perkembangan produksi ikan di laut seperti di bawah ini:

Tabel 2.4 Hasil tangkapan ikan di laut dan perairan umum

Sumber produksi	Jenis ikan	Produksi /tahun/ton				
		2017	2018	2019	2020	2021
Laut	Ikan, udang	563,1	580,91	602,67	628,54	635,47
Sungai	Ikan, udang	95,54	98,6	100,64	101,84	100,61
Danau	Ikan, udang	18,6	19,25	22,43	24,19	26,00
Jumlah		677,26	696,76	725,74	754,54	762,10

Sumber : Perikanan Dalam Angka, 2021

3. Pengembangan Produk Bernilai Tambah

UKM/ poklhasar binaan dinas sudah memahami pentingnya inovasi dalam peningkatan daya saing produk perikanan yang mana sifat dasar ikan yang *farisable food* akan bernilai tambah apabila disentuh dengan teknologi pengolahan dan pengemasan yang tepat. Teknologi pengolahan ikan sesuai pengelompokan Ditjen Peningkatan Daya Saing KKP ada 10 macam, namun di Tabanan yang sudah berkembang sesuai jensi teknologinya baru 4 macam yaitu pemindangan (ikan pindang), pengasapan (ikan asap), pelumatan (bakso, nugget, luluh sate, ladrang, chip), dan pengolahan lainnya pepes, kripik belut, nila renyah, sate ikan, krupuk kulit ikan, abon, teri wijen). Adapun datanya disajikan seperti berikut ini.

Tabel 2.5 Produk olahan hasil perikanan

Jenis olahan (jenis)	Produksi olahan/tahun/ton				
	2017	2018	2019	2020	2021
Pemindangan	2.127,75	2.167,57	2.200,62	2.169,64	2.150,74
Pelumatan	195,31	12,81	11,64	161,70	209,19
Olahan lainnya	36,19	222,63	233,50	122,03	150,01
Jumlah	2.359,25	2.403,01	2.445,76	2.453,37	2.509,93

Sumber : Perikanan Dalam Angka, 201

Distribusi dan pemasaran produk perikanan terus dibina dan diawasi baik produk lokal maupun produk luar daerah yang diserap pasar. Adapun ikan yang dipasarkan seperti :

- ikan hidup seperti ikan lele, belut, gurami, nila
- ikan segar seperti ikan lemuru, bandeng, tongkol, kembung, cakalang, udang, kuniran, layur, kekerangan, siput air, nila, mas, cumi, dan lainnya
- ikan olahan seperti pindang, pepes, sate, bakso, abon, belut goreng, nila rapuh tulang, teri wijen, ikan asin, petis, dendeng, dan lainnya.

Selain pemasaran ikan untuk bahan pangan juga dipasarkan produk perikanan bernilai ekonomis tinggi (produk nonkonsumsi) seperti :

- Ikan hias air tawar seperti koi, komet, koki bali, manvis, dan lainnya
- Kerajinan kekerangan untuk hiasan rumah, sarana upacara, dan lainnya

Pengembangan sumber daya manusia pelaku utama perikanan binaan dinas dilakukan melalui pelatihan, bimbingan teknis, studi banding, temu teknis, temu kemitraan, dan temu usaha sehingga terjadi peningkatan pengetahuan dan keterampilan berusaha, baik sumber dananya dari APBD maupun APBN.

Table 2.7 Peningkatan SDM pelaku perikanan

Tahun	Pelatihan pelaku utama perikanan / orang / thn				
	Pembudidaya	Nelayan	Pengolah ikan	Masyarakat	Pokmaswas
2016	30	30	30	80	0
2017	20	20	0	0	0
2018	50	20	0	0	0
2019	30	25	25	0	0
2020	25	0	0	0	0
2021	50	0	25	0	0

Sumber : Laporan Tahunan Dinas Perikanan, 2021

Penyebarluasan data dan informasi pembangunan perikanan dan kelautan telah dipertimbangkan oleh dinas, sehingga diusahakan penyediaan data yang *up to date* yang dibutuhkan oleh instansi pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam bentuk brosur, liflet, buku, dan lainnya. Informasi pembangunan juga disebarluaskan melalui papan informasi dan *website* secara berkala.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Evaluasi pelayanan dari indikator kinerja daerah (IKD) RPJMD Semesta Berencana pada Bab IX dan indikator pembangunan di akhir RPJMD dianalisis untuk tahun 2016-2021. Adapun penjelasannya sebagai berikut :

- Pelayanan indikator produksi perikanan dilaksanakan oleh Bidang Pemberdayaan Pembudidaya Ikan dan Bidang Pemberdayaan Nelayan.
- Pelayanan indikator konsumsi ikan dilaksanakan oleh Bidang Pengkajian dan Pengembangan.
- Pelayanan indikator cakupan binaan pelaku utama perikanan dilaksanakan Tim Pemberdayaan Kelompok Perikanan. Panjabaran capaian kinerja dapat disajikan seperti tabel berikut ini.

Tabel 2.8 Capaian indikator pembangunan

Aspek	Fokus	Indikator	2020			2021			Sat
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
Daya saing daerah	Kemampuan ekonomi	Produksi perikanan	4.580,2	3.850,89	88,08	4.854,9	3.864,4	81,7	Ton
		Konsumsi	31,8	31,49	99,02	32,2	31,67	98,4	Kg/

	daerah	ikan							kap/th
		Cakupan bina kelompok perikanan	191	194	101,57	196	218	112,2	klp
	Rata-rata				96,22			97,4	

Sumber : Analisis Data, 2021

Dari tabel diatas menunjukkan kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Tabanan dalam mendukung kinerja pemerintah daerah di tahun 2016-2021 yang diukur melalui indikator kinerja daerah urusan kelautan dan perikanan ada yang mengalami peningkatan dan ada yang mengalami penurunan, sehingga kedepan perlu ditingkatkan kinerja pencapaian indikator produksi perikanan budidaya dan produksi benih ikan melalui kajian teknokratik yang baik sehingga program dan kegiatan dapat didukung oleh anggaran pembangunan baik APBD dan APBN yang dapat memberikan dampak pada peningkatan kinerja daerah.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu – isu yang menjadi focus pembangunan sesuai tema RKPD Tahun 2022 yaitu isu generasi melineal dan isu industri pariwisata berkelanjutan, dimana urusan kelautan dan perikanan masuk di dua isu tersebut. Dinas Perikanan telah mengidentifikasi isu-isu startegis dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi yang ada dengan mengkaji sinergisitas arah kebijakan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten. Adapun hasil rumusannya adalah :

1. Bidang Pemberdayaan Pembudidaya Ikan

Kabupaten Tabanan memiliki potensi pengembangan perikanan budidaya air tawar yang cukup besar, sedangkan untuk pengembangan budidaya air payau kurang cocok karena pesisir pantai yang curam dan terjal, begitu juga budidaya laut kurang cocok dikembangkan karena arus dan ombak yang besar dan tidak ada teluk di sepanjang pantai. Pengembangan budidaya air tawar teridentifikasi masih adanya kendala yaitu :

- a. Pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi pembudidaya ikan dalam mengelola usaha budidaya ikan masih rendah, sehingga belum banyak pembudiaya ikan menjadi wirausahawan yang maju dan produktif.
- b. Debit air yang mulai mengecil serta kualitasnya menurun di berbagai sentra-sentra produksi ikan, sehingga usaha minapadi kurang berkembang.
- c. Harga pakan buatan yang terus meningkat sedangkan pakan alternatif belum banyak dikembangkan, sehingga biaya produksi terus meningkat.



- d. Penyediaan berbagai jenis ikan konsumsi seperti ikan bawal, gurami, patin, udang galah, dan belut) masih terbatas atau masing-masing mendatangkan dari luar daerah, sehingga harganya relatif lebih tinggi.
- e. Penyediaan benih ikan bermutu masih terbatas dan masih ada benih ikan yang dibudidayakan masyarakat belum mampu disediakan daerah seperti benih udang galah, patin, bawal, dan gurame.
- f. Belum mempunya BBI dan UPR menghasilkan calon induk unggul sehingga masih mendatangkan calon induk unggul dari luar daerah.
- g. Masih diketemukan adanya serangan hama dan penyakit ikan, sehingga pembudidaya ikan sering terjadi penurunan hasil panen.
- h. Terbatasnya permodalan bagi pembudidaya ikan dalam penyediaan saprokan dan biaya operasional, sehingga usahanya kebanyakan masih berskala mikro dan kecil.
- i. Usaha budidaya perikanan yang tersebar dan belum tersentra, sehingga upaya pengaturan produksi, pembinaan, dan pendampingan belum optimal.
- j. Penerapan kaji terap teknologi adaptif budidaya perikanan belum optimal sehingga belum banyak pokdakan dan panti benih memiliki sertifikat CBIB dan CPIB.

2. Bidang Pemberdayaan Nelayan

Kabupaten Tabanan memiliki potensi pengembangan perikanan tangkap lestari yang masih cukup besar atau belum terjadi *over fishing*. Pengembangan perikanan tangkap teridentifikasi adanya kendala yaitu :

- a. Armada perikanan tangkap yang masih kecil (jukung bermesin tempel yang kurang dari 5 GT) sehingga *fishing ground* masih terbatas di pesisir dan hasil tangkapannya pun relatif rendah.
- b. Belum optimalnya pengawasan Syahbandar dalam uji kelayakan operasional nelayan melaut.
- c. Alat tangkap yang digunakan masih sederhana seperti jaring insang hanyut, jaring klitik, jaring tiga lapis, jala, pancing, dan bubu yang tingkat produksinya masih rendah.
- d. Pangkalan pendaratan armada tangkap belum tersentral sehingga armada tangkap ditambatkan di sepadan pantai.
- e. Pangkalan pendaratan ikan belum tersentral sehingga ikan yang dihasilkan dipasarkan langsung ke pedagang pengumpul.
- f. Penanganan hasil tangkapan di laut (di perahu) belum optimal sehingga mutu hasil tangkapan setelah sampai di darat kurang optimal.
- g. Terbatasnya permodalan nelayan untuk pengadaan armada, alat tangkap, dan biaya operasional penangkapan.



- h. Kurangnya minat generasi muda untuk mengembangkan jiwa baharinya sehingga regenerasi nelayan kurang berkembang.
- i. Pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi SDM nelayan masih rendah.

3. Bidang Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan

Kabupaten Tabanan memiliki potensi sumber daya RTP / Poklahsar yang usahanya mampu memproduksi aneka produk perikanan yang mampu diserap pasar. Pengembangan produk perikanan yang berdaya saing teridentifikasi adanya kendala yaitu :

- a. Belum optimalnya penanganan rantai dingin produk perikanan baik itu ikan hidup dan segar sehingga mutu ikan cenderung menurun karena sifatnya yang *farisable food*.
- b. Belum berkembangnya variasi olahan ikan dan pengolahan hasil-hasil perikanan yang bernilai tambah tinggi, sehingga produk yang dihasilkan masih dipasarkan di pasar lokal yang harganya cenderung belum tinggi.
- c. Belum berkembangnya inovasi pengemasan produk yang sesuai selera pasar, sehingga produk perikanan yang dihasilkan jangka waktu kadaluwarsanya pendek dan belum mampu menembus BUMDA dan pasar modern seperti rumah makan, minimarket, supermarket, restoran, dan hotel.
- d. Tingkat konsumsi ikan masyarakat perkapita pertahun masih rendah atau masih di bawah rata-rata konsumsi ikan perkapita pertahun provinsi, sehingga masyarakat kurang dalam mengkonsumsi ikan hidup, segar, maupun olahan.
- e. Terbatasnya akses permodalan dalam pengembangan usaha, sehingga usaha poklahsar masih berskala mikro kecil dan masih kuranya minat investor berinvestasi.
- f. Unit-unit pengolah dan pemasar ikan hidup, segar, olahan, dan produk nonkonsumsi tersebar, sehingga promosi dan pemasaran produknya belum dikenal luas konsumen.
- g. Pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi SDM pengolah ikan masih rendah

4. Bidang Pengkajian dan Pengembangan Sumber Daya Perikanan

Kabupaten Tabanan memiliki potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang cukup besar dalam pengembangan perikanan, namun masih ditemukan adanya kendala yaitu :

- a. Sumber daya aparatur yang tufoksinya membina masyarakat perikanan belum semuanya memiliki berkualifikasi pendidikan sarjana perikanan atau memiliki sertifikat keterampilan dasar, lanjutan di bidang perikanan, maupun ahli dan



asesor, padahal dinamisasi pembangunan perikanan terus meningkat yang menuntut kompetensi SDM.

- b. Sumber daya pelaku usaha dan pelaku utama perikanan yang pengetahuan, keterampilan, dan sikapnya belum mencerminkan wirausaha maju sehingga usaha masih kebanyakan berskala mikro kecil dan belum semuanya bankable.
- c. Kelembagaan kelompok masyarakat perikanan yang belum menerapkan manajemen usaha yang *bankable* sehingga belum banyak yang mampu mengakses modal untuk pengembangan usahanya.
- d. Penyediaan data dan informasi yang akurat dan *up to date* masih lemah sehingga pihak-pihak yang membutuhkan data dan informasi untuk kepentingan perencanaan, evaluasi, maupun investasi kurang didukung oleh data dan penyebarluasannya kurang didukung oleh media informasi.

2.4 Penelaan Ranwal RKPD

Rancangan Renja Dinas Perikanan telah disusun dan diverifikasi oleh Tim RKPD Kabupaten Tabanan sesuai tahapan perencanaan kinerja. Ranwal perangkat daerah merupakan rancangan yang dituangkan dari Renstra tahun kedua. Ranwal perangkat daerah sudah disempurnakan sesuai alur perencanaan dari :

- Musrenbangcam tanggal 14-15 Maret 2022. Jadwal musrenbang tingkat kecamatan yang wajib di hadiri oleh OPD terkait.
- Forum OPD tanggal 23 Maret 2023
- Musrenbangkab tanggal 29 Maret 2022 yang dilaksanakan secara daring melalui meeting ID 897 7589 1866 dan password tbn22
- Musrenbangprov tanggal 6 April 2022

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pembangunan Kabupaten Tabanan yang mengacu pada visi dan misinya tersebut dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan, salah satu pendekatan yang dipakai adalah pendekatan partisipatif, yang dilakukan melalui penyerapan aspirasi dan partisipasi aktif usulan pembangunan dari musyawarah desa (musrendes), musyawarah kecamatan (musrenbangcam), musrenbangkab, musrenbangprov, dan musrenbangnas.

Program prioritas pemerintah Kabupaten Tabanan Tahun 2022 ada 5 program prioritas yaitu : pendidikan, kesehatan, jaminan sosial dan ketenagakerjaan, pertanian, budaya dan industri pariwisata, lingkungan hidup, dan infrastruktur.

Dinamika perencanaan yang terus berkembang, maka Dinas Perikanan melakukan kajian partisipatif dan teknokratif sesuai tahapan perencanaan yang dikoordinir oleh Bapelitbang. Adapun usulan yang diajukan melalui hasil analisis program prioritas sebagai berikut :



Tabel Usulan Program Prioritas

Program Prioritas	Sumber usulan	Kajian Teknis	Sasaran Program
Pengelolaan perikanan budidaya	Bidang Pemberdayaan Pembudidaya Ikan	Belum optimalnya pemanfaatan potensi budidaya perikanan untuk mendorong peningkatan produksi komoditas perikanan budidaya	UPR, BBI, Pokdakan
Pengelolaan perikanan tangkap	Bidang Pemberdayaan Nelayan	Belum optimalnya pemanfaatan sumber daya ikan di laut, sungai, dan danau untuk mendorong peningkatan hasil tangkapan ikan yang <i>sustainable</i> .	KUB Nelayan, KUGAR
Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Bidang Pengkajian dan Pengembangan	Belum optimalnya teknologi pengolahan hasil perikanan untuk peningkatan produksi produk olahan bernilai tambah	UKM / UPI, Poklahsar
Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Sekretariat	Belum optimalnya kinerja instansi dalam pelayanan administrasi, pelayanan publik, dan reformasi birokrasi dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja dinas	Aparatur

Usulan kegiatan tersebut sudah melalui analisis lingkungan staretgis sehingga diharapkan dapat mengakomodir usulan aptisipatif, teknokratik, dan politis. Adapun usulan kegiatan perangkat daerah disajikan seperti tabel berikut ini.

Tabel Usulan Kegiatan Prioritas

Kegiatan Prioritas	Sumber usulan	Kajian Teknis	Sasaran Kegiatan
PenerbitanTanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam1 (satu) daerah kabupaten/ kota	Bidang Pemberdayaan Pembudidaya Ikan	Sesuai Kepmendagri 050/2021 indiaktor sub kegiatannya adalah mengelauran rekomendasi yang menjadi kewenangan provinsi, sehingga sub kegiatan ini <i>dicrossating</i>	-
Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	UPTD Produksi Perikanan Budidaya	Unit pembenihan ikan milik pemerintah yang tersebar di 4 unit BBI memerlukan saprokan dalam mendukung usaha pembenihan ikan sehingga dapat memberikan kontribusi pada PAD	UPR, BBI
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Bidang Pemberdayaan Pembudidaya Ikan	Belum semua pokdakan melaksanakan teknologi tepat guna dalam budidaya perikanan dan pengendalian kesehatan ikan dan lingkungan, sehingga CBIB belum optimal dalam menghasilkan komoditas unggulan daerah	Pembudidaya ikan/Pokdakan
Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu)	Bidang Pemberdayaan Nelayan	Indikator sub kegiatan sesuai Kepmendagri 050/2021 adalah jumlah prasarana perikanan tangkap yang tersedia, dimana indikator tersebut tidak sesuai dengan rencana output sub kegiatan yaitu pemberian sarana perikanan tangkap sehingga dilakukan <i>crossating</i>	Nelayan/ KUB nelayan
Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah	Bidang Pemberdayaan Nelayan	Pengurus dan anggota KUB nelayan laut dan nelayan pesisir kekurangan modal usaha dalam penyediaan	Nelayan/ KUB nelayan, KUGAR



Kabupaten/Kota		armada dan API (alat penangkapan ikan) yang produktif produktif	
Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Bidang Pengkajian dan Pengembangan	Indikator sub kegiatan sesuai Kepmendagri 050/2021 adalah jumlah rekomendasi buku kapal perikanan yang diterbitkan, dimana indikator tersebut tidak menjadi kewenangan Dinas Perikanan Kabupaten untuk mengeluarkan rekomendasi buku kapal perikanan (BKP) tetapi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali sehingga dilakukan <i>crosscutting</i>	-
Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Bidang Pengkajian dan Pengembangan	Masih besarnya ketergantungan penyediaan bahan baku dari luar daerah untuk bahan baku olahan bagi UKM/poklhasar untuk menghasilkan produk perikanan berdaya saing	UKM / UPI, Poklhasar
Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Bidang Pengkajian dan Pengembangan	Belum semua UKM/poklhasar dan PKK memahami pentingnya ikan sebagai bahan pangan bergizi tinggi sehingga diperlukan sosialisasi, pelatihan, dan demo mengolah ikan	UKM / UPI, Poklhasar, PKK
Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro Dan Kecil	Bidang Pengkajian dan Pengembangan	Belum optimalnya pendataan pelaku usaha perikanan dalam penyusunan database yang dijadikan dasar perencanaan, promosi, dan pameran produk perikanan	UKM / UPI, Poklhasar, Pengumpul
Pencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Sekretariat	Belum optimalnya kualitas dokumen perencanaan, evaluasi, dan pelaporan kinerja sebagai tolok ukur indikator pembangunan perikanan	Aparatur
Administrasi keuangan Perangkat Daerah	Sekretariat	Belum akuntabelnya pengelolaan keuangan sehingga memerlukan manajemen penatausahaan yang akurat	Aparatur
Administrasi umum perangkat daerah	Sekretariat	Belum optimalnya pelayanan administrasi untuk mendukung reformasi birokrasi	Aparatur
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sekretariat	Masih kurangnya sarana kerja berbasis teknologi yang mendukung kinerja instansi berbasis TI	Aparatur
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sekretariat	Masih kurangnya jasa penunjang kelancaran administrasi perkantoran PD dan pelayanan tenaga non PNS	Aparatur
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Sekretariat	Masih banyaknya sarana kerja dan sarana operasional yang rusak sehingga memerlukan biaya servis/ pemeliharannya	Aparatur



III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Sinkronisasi program dan kegiatan dilakukan secara terpadu dan sinergis, dimana pemerintah pusat telah menetapkan 9 (sembilan) agenda prioritas atau Nawa Cita yang wajib dijabarkan oleh pemerintah daerah yaitu :

1. Akan menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan member rasa aman pada warga negara.
2. Akan membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Akan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Akan menolak negara lemah dengan melakukan reformasi system penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Akan meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui Indonesia Pintar, Indonesia Sehat, Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera.
6. Akan meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.
7. Akan mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Akan melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Akan memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial.

Keterkaitan RPJMN dan RPJMD merupakan dasar perencanaan pembangunan. Pemerintah pusat telah menetapkan tema pembangunan 2023 yaitu “Pemerataan pembangunan untuk pertumbuhan berkualitas,” dan tema pembangunan daerah di tahun 2023 yaitu “ generasi milenial untuk pariwisata berkelanjutan”.

Pemerintah pusat telah menetapkan 5 prioritas nasional yang sudah menjadi kewajiban daerah mendukung pencapaiannya. Adapun prioritas nasional tersebut antara lain :

1. Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar
2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman
3. Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri dan jasa produktif
4. Pemantapan ketahanan energi, pangan, dan sumber daya air
5. Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu

Program kerja daerah juga bersinergi dengan program kerja pusat khususnya Kementerian Kelautan dan Perikanan RI yaitu :



1. Program Pengelolaan Ruang Laut.
2. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap.
3. Program Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Budidaya.
4. Program Penguatan Daya Saing Produk Perikanan.
5. Program Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
6. Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK Kelautan dan Perikanan.
7. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia dan pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan.
8. Program Pengembangan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan.
9. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur KKP.
10. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KKP

Asta Program merupakan prinsip pembangunan daerah Kabupaten Tabanan dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati yaitu Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E., M.M. dan I Made Edi Wirawan, S.E. sebagai pedoman dan bintang pemandu dalam melaksanakan tugas-tugas selaku Kepala Daerah periode tahun 2021-2026. Perencanaan pembangunan dengan Asta Program memiliki nilai dan arti strategis dalam rangka mengemban amanat penderitaan rakyat Tabanan untuk menuju kepada kesejahteraan rakyat Tabanan sehingga mampu menjamin hak-hak rakyat didalam menjalani perikehidupan di Kabupaten Tabanan. Asta Program dijabarkan atas: Dinas Perikanan sebagai unit teknis di Pemerintah Kabupaten Tabanan dalam pembangunan urusan kelautan dan perikanan mengacu pada asta program prioritas pemerintah Kabupaten Tabanan, yaitu:

1. Pembangunan Berbasis Riset Dan Inovasi Daerah
2. Data Desa Presisi
3. Reformasi Birokrasi
4. Pembangunan Rohani Dan Jasmani Yang Sehat Dan Kuat
5. Pembangunan Ekonomi Yang Berkeadilan Sosial
6. Pembangunan Hukum Yang Berkeadilan
7. Pembangunan Kesejahteraan Rakyat
8. Pembangunan Industri Berbasis Potensi Lokal

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

a. Tujuan Perangkat Daerah

Tujuan 2 (sasaran 2) dan Tujuan 3 (sasaran 1) pada RPJMD Semesta Berencana inilah dijabarkan ke dalam Renstra PD sehingga terjadi sinkronisasi dokumen perencanaan RJMD SB dan Renstra PD. Data seperti berikut ini.

Tabel 4.1 Visi, Misi, Tujuan PD

RPJMD SB				Renstra PD
Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Tujuan
Nangun Sat Kertih Loka Bali melalui PPSB di Kabupaten Tabanan menuju Tabanan Era Baru : Aman Unggul Madani	Mewujudkan masyarakat Tabanan yang aman dan nyaman dalam perikehidupan (Aman)	Terwujudnya masyarakat Tabanan yang aman dan nyaman dalam perikehidupan	6 Sasaran	-
	Membangun masyarakat Tabanan yang memiliki kemampuan dan berdaya saing tinggi di segala bidang kehidupan (Unggul)	Terbangunnya masyarakat Tabanan yang memiliki kemampuan dan berdaya saing tinggi di segala bidang kehidupan	2.2Meningkatnya kualitas tata Kelola pemerintahan daerah	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Perikanan
	Mewujudkan masyarakat Tabanan yang memiliki kemandirian secara sosial-ekonomi di berbagai bidang yang berkepribadian dalam kebudayaan (Madani)	Terwujudnya masyarakat Tabanan yang memiliki kemandirian secara sosial-ekonomi di berbagai bidang yang berkepribadian dalam kebudayaan	3.1Penguatan Sektor Pertanian Sebagai Unggulan Pembangunan Kabupaten Tabanan	Meningkatkan konsumsi ikan masyarakat

Sumber : RPJMD Semesta Berencana 2021-2026

b. Sasaran Perangkat Daerah

Sasaran merupakan penjabaran setiap tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran Dinas Perikanan Kabupaten Tabanan adalah penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan strategi dalam dokumen RJMD Semesta Berencana tahun 2021-2026 yaitu mengembangkan inovasi untuk peningkatan produksi/produktivitas dan olahan hasil perikanan sehingga tingkat konsumsi ikan perkapita masyarakat terus meningkat.

Sasaran Dinas Perikanan Kabupaten Tabanan merupakan bagian integrasi dari proses perencanaan startegik, dan ditetapkan untuk dapat menjamin suksesnya pelaksanaan jangka panjang yang sifatnya menyeluruh serta untuk memudahkan pengendalian dan pemantauan kinerja organisasi.

Sasaran Dinas Perikanan Kabupaten Tabanan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan adalah seperti tabel di bawah ini.

Tabel Tujuan dan Sasaran

No	Tujuan	No	Sasaran
1	Meningkatnya konsumsi ikan masyarakat	1.1	Meningkatnya produksi perikanan
		1.2	Meningkatnya daya saing produk olahan hasil perikanan
2	Meningkatkan kinerja Dinas	2.1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi

Perikanan yang akuntabel	pemerintah pada Dinas Perikanan
--------------------------	---------------------------------

Indikator kinerja sasaran disusun dan ditetapkan oleh Perangkat Daerah dengan mengacu pada sasaran strategis yang dirumuskan menjadi indikator kinerja utama (IKU). IKU yang sering pula disebut *Key Performance Indicator* merupakan acuan untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja prioritas program yang bersifat strategis. Dalam petunjuk teknis Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disebutkan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dinamika pengelolaan pemerintahan yang semakin dinamis mendorong perumusan indikator kinerja semakin holistik, maka sesuai hasil pemetaan pohon kinerja beserta turunannya sudah dirumuskan dilakukan IKU (Indikator Kinerja Utama) yang direncanakan dicapai tahun 2021-2026 seperti tabel berikut ini.

Tabel Indikator Kinerja Sasaran

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran/Utama	Kondisi awal	Target Kinerja Tahun ke-						Sa- tu an
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Meningkatnya konsumsi ikan masyarakat	Meningkatnya produksi perikanan	Prosentase peningkatan produksi perikanan	0,30	0,35	0,55	0,75	0,95	1,10	1,20	%
	Meningkatnya daya saing produk olahan hasil perikanan	Prosesntase UPI yang ber-SKP dalam mengashilkan produk olahan hasil perikanan bernilai tambah	0	1,6	3,1	4,6	6,0	7,4	10,2	%
Meningkatnya kinerja Dinas Perikanan yang akuntabel	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai LKjIP	80	80	80,5	81,0	81,5	82,0	82,5	A

c. Strategi Perangkat Daerah

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi *stakeholder* layanan. Di sini



penting untuk mendapatkan parameter utama yang menunjukkan bagaimana strategi tersebut menciptakan nilai (*strategic objective*). Melalui parameter tersebut, dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi sekaligus untuk menciptakan budaya “berpikir strategik” dalam menjamin bahwa transformasi menuju pengelolaan pemerintah daerah yang lebih baik, transparan, akuntabel dan berkomitmen terhadap kinerja, strategi harus dikendalikan dan dievaluasi (*learning process*). Adapun sasaran dan strategis yang sudah disinkronisasikan disajikan seperti tabel di bawah ini.

Tabel Sasaran dan Strategi

No.	Sasaran	Strategi
1.	Meningkatnya produksi perikanan	Memberdayakan usaha pembudidayaan ikan
		Memberdayakan usaha penangkapan ikan
2	Meningkatnya daya saing produk olahan hasil perikanan	Memberdayakan usaha pengolahan dan pemasaran produksi perikanan
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Dinas Perikanan	Meningkakan kinerja Dinas Perikanan dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

d. Arah Kebijakan

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka ditempuh strategi dan kebijakan. Agar tujuan dan sasaran dapat dicapai dengan optimal maka diperlukan cara mencapai tujuan dan sasaran organisasi.

Kebijakan adalah pedoman melaksanakan tindakan-tindakan tertentu. Suatu kebijakan dapat mencakup/mendasari lebih dari satu sasaran/kegiatan. Berbagai kebijakan yang mendasari pelaksanaan tujuan dan sasaran Dinas Perikanan adalah yang sudah disinkronisasikan seperti lampiran 7 .

e. Asta Program dan Program Perikanan

Pembangunan Kabupaten Tabanan yang mengacu pada visi dan misinya tersebut dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan, salah satu pendekatan yang dipakai adalah pendekatan partisipatif, yang dilakukan melalui penyerapan aspirasi dan partisipasi aktif usulan pembangunan dari musyawarah desa (musrendes), musyawarah kecamatan (musrenbangcam), musrenbangkab, musrenbangprov, dan musrenbangnas.

Program prioritas pemerintah Kabupaten Tabanan Tahun 2023 ada 8 program prioritas yang disebut asta program. Dinas Perikanan sebagai unit teknis di Pemerintah Kabupaten Tabanan dalam pembangunan urusan kelautan dan perikanan mengacu pada asta program prioritas pemerintah Kabupaten Tabanan. Sinergisitas asta program telah dijabarkan dalam program pembangunan perikanan seperti table berikut ini.

Asta Program Pemda	Program Perikanan
Pembangunan Berbasis Riset dan Inovasi Daerah	Pengelolaan perikanan budidaya Pengelolaan perikanan tangkap Pengolaan dan pemasaran hasil perikanan
Data Desa Presisi	Pengelolaan perikanan budidaya Pengelolaan perikanan tangkap Pengolaan dan pemasaran hasil perikanan
Reformasi Birokrasi	Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota
Pembangunan Rohani dan Jasmani Yang Sehat dan Kuat	Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota
Pembangunan Ekonomi Yang Berkeadilan Sosial	Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota
Pembangunan Hukum Yang Berkeadilan	Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota
Pembangunan Kesejahteraan Rakyat	Pengelolaan perikanan budidaya Pengelolaan perikanan tangkap Pengolaan dan pemasaran hasil perikanan
Pembangunan Industri Berbasis Potensi Lokal	Pengelolaan perikanan budidaya Pengelolaan perikanan tangkap Pengolaan dan pemasaran hasil perikanan

Program Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Tabanan sesuai Permendagri 90 Tahun 2019 ada 4 program yaitu :

- Pengelolaan perikanan budidaya
- Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
- Pengelolaan perikanan tangkap
- Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota

Indikator kinerja program yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana dijabarkan dalam Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Tabanan sebagai dukungan atas rencana pencapaian indikator kinerja sasaran. IKP di Dinas Perikanan sudah dirumuskan oleh manajemen agar terukur dan mencerminkan kinerja instansi. Adapun rancangan indikator kinerja program yang direncanakan diukur periode tahun 2021-2026 seperti tabel berikut ini.

Tabel Indikator Kinerja Program

Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi awal	Target/tahun					Kondisi Akhir
			2021	2022	2023	2024	2025	
Pengelolaan perikanan budidaya	Prosentase peningkatan produksi perikanan budidaya (%)	0,1	0,2	0,4	0,6	0,8	1,0	1,1
Pengelolaan perikanan tangkap	Prosentase peningkatan produksi perikanan tangkap (%)	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6
Pengolahan dan pemasaran	Prosentase peningkatan produksi produk	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4



hasil perikanan	olahan hasil perikanan (%)							
Penunjang urusan pemerintahan daerah	Prosentase layanan menunjang tugas pokok dan fungsi PD	100	100	100	100	100	100	%

3.3 Kegiatan Prioritas

a. Kegiatan Perikanan

Kegiatan prioritas pembangunan yang berkelanjutan di daerah sudah disinergiskan dengan program daerah sehingga hasil (outcome) akan dapat dikukur dari keluaran (output) kegiatan. Berikut sinkronisasi program dan kegiatan dalam perencanaan kinerja seperti berikut ini.

Tabel Program dan Kegiatan

No	Program	No	Kegiatan
1	Program pengelolaan perikanan budidaya	1.1	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota
		1.2	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil
		1.3	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
2	Program pengelolaan perikanan tangkap	3.1	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu)
		3.2	Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota
		3.3	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota
3	Program Pengolaan dan pemasaran hasil perikanan	4.1	Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota
		4.2	Pembinaan Mutudan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
		4.3	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro Dan Kecil
4	Progam penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	5.1	Prencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah
		5.2	Administrasi keuangan Perangkat Daerah
		5.3	Administrasi umum perangkat daerah
		5.4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		5.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		5.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

b. Sub Kegiatan

Dinamika perencanaan kinerja yang semakin berorientasi hasil, maka sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka kegiatan dijabarkan lebih detail dalam sub kegiatan. Adapun sub kegiatan yang sudah disinkronkan seperti berikut ini.

No	Kegiatan	No	Sub Kegiatan
A 1	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil	1.1	Pelayanan penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1



	(TDPIK) dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota		(satu) Daerah Kabupaten/Kota
2	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	2.1	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil
3	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	3.1	Penyediaan prasarana pembudiaya ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota
B1	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu)	1.1	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap
2	Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.1	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha
3	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	3.1	Pelayanan Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran Sampai Dengan 10 GT
C1	Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	1.1	Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
2	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	2.1	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
3	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro Dan Kecil	3.1	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
D1	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	1.1	Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah
		1.2	Evaluasi kinerja Perangkat Daerah
2	Administrasi keuangan Perangkat Daerah	1.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		2.1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
3	Administrasi umum perangkat daerah	3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
		3.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga
		3.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
		3.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
		3.5	Penyediaan bahan material
		3.6	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.1	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.1	Penyediaan jasa surat menyurat
		5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		5.3	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.1	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak, dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
		6.2	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
		6.3	Pemeliharaan/rahabilitasi sarana dan



			prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya
--	--	--	---

3.4 Forum OPD

Dinamika perencanaan yang terus berkembang, maka Dinas Perikanan melakukan kajian teknokratif atas hasil musrenbang dan kajian partisipatif sesuai tahapan perencanaan melalui Forum OPD dengan hasil dirumsukan sebagai berikut.

No	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Rencana Pagu	
			2023	2024	2023 Ribu (Rp)	2024 Ribu (Rp)
I	Program Pengelolaan perikanan budidaya	Prosentase peningkatan produksi perikanan budidaya (%)	0,6	0,8	354.000	392.000
I.1	Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota	Jumlah tanda daftar bagi pembudi daya ikan kecil yang produktif diterbitkan setahun	0	0	0	0
a	SK: Pelayanan penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/Kota	Jumlah rekomendasi perijinan bagi pembudidaya ikan kecil yang menjadi kewenangan kabupaten/kota (rekomendasi)	0	0	0	0
I.2	Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah pokdakan produktif terbina (klp)	226.0	236.0	254.000	235.000
a	SK : Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah kelompok pembudidaya ikan kecil yang mengikuti Pengembangan Kapasitas	35	37	202.000	175.000
b	SK: Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah kelompok pembudidaya ikan kecil yang difasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaannya (klp)	4	4	52.000	60.000
I.3	Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah kaji terap teknologi produktif dihasilkan setahun	1	1	135.000	157.000
a	SK: Penyediaan prasarana pembudi daya ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (unit)	4	4	70.000	87.000
b	SK : Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah hasil ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang teruji melalui kesehatan ikan (dokumen)	2	2	65.000	70.000
II	Program pengelolaan perikanan tangkap	Prosentase peningkatan produksi perikanan tangkap (%)	1,3	1,4	300.000	350.000
2.1	Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) daerah	Jumlah produksi perikanan tangkap di perairan umum setahun	134.1	138.1	310.144	200.000
a	SK: Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap terjamin dan tersedia (unit)	0	0	0	0
b	SK: Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah sarana usaha perikanan tangkap terjamin dan tersedia (unit)	4	4	310.144	200.000
2.2	Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah KUB nelayan terbina produktif setahun	80	81	12.000	15.000
a	SK: Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah unit usaha yang difasilitasi penyaluran Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	3	3	6.000	7.000
b	SK: Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan	Jumlah kelompok nelayan kecil yang difasilitasi pembentukan	1	1	6.000	8.000



No	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Rencana Pagu	
			2023	2024	2023 Ribu (Rp)	2024 Ribu (Rp)
	Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	dan pengembangan kelembagaanya				
2.3	Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah armada tangkap nelayan yang sudah diterbitkan tanda daftar kapal perikanan skala kecil	0	0	0	0
a	SK: Pelayanan Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah armada nelayan skala kecil yang terlayani pendaftaran armada tangkapnya	0	0	0	0
I3	Program Pengolaan dan pemasaran hasil perikanan	Prosentase peningkatan produksi produk olahan hasil perikanan (%)	1,1	1,2	505.000	555.000
3.1	Kegiatan Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah jenis ikan sebagai bahan baku olahan produk bernilai tambah dimanfaatkan	7	8	12.000	395.000
a	SK:Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (ton)	17	19	12.000	395.000
3.2	Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah poklhasar produkif terbina (klp)	68	70	25.500	85.000
A	SK: Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah unit usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap persyaratan perijinan berusaha pada Usaha Pengolahan dan pemasaran sesuai skala usaha dan resiko (klp)	67	69	25.500	85.000
3.3	Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro Dan Kecil	Jumlah poklhasar yang dapat difasilitasi pendaftaran usaha pengolahan hasil perikanan setahun	1	1	10.000	75.000
a	SK: Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan resiko (dokumen)	2	2	10.000	75.000
IV	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Prosentase layanan menunjang tugas pokok dan fungsi PD (%)	100	100	6436.402	6.838.700
4.1	Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen SAKIP dihasilkan setahun	4	4	7.000	8.000
a	SK: Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (laporan)	4	4	4.000	4.000
b	SK: Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah (laporan)	4	4	3.000	4.000
4.2	Kegiatan Administrasi keuangan Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi keuangan diberikan setahun	12	12	5.088.397	5.831.700
a	SK: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang)	39	39	5.083.397	5.502.700
b	SK: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	4	4	5.000	5.000



No	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Rencana Pagu	
			2023	2024	2023 Ribu (Rp)	2024 Ribu (Rp)
		Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (laporan)				
4.3	Kegiatan Administrasi umum perangkat daerah	Jumlah jenis layanan perangkat daerah diberikan setahun	4.0	4.0	96.000	98.000
a	SK: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor disediakan (paket)	1	1	3.000	3.000
b	SK: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga disediakan (paket)	1	1	3.000	4.000
c	SK: Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor disediakan (paket)	1	1	28.000	29.000
d	SK: Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan disediakan (paket)	2	2	8.000	9.000
e	SK: Penyediaan bahan material	Jumlah paket Bahan/Material disediakan (paket)	1	1	19.000	20.000
f	SK: Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	1	1	34.000	34.000
4.4	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis BMD disediakan menunjang operasional dinas	2	2	56.000	59.000
A	SK: Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya disediakan (unit)	2	2	56.000	59.000
4.5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis jasa penunjang kinerja pelayanan dinas	6.0	6.0	710.000	720.000
a	SK: Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah laporan Jasa Surat menyurat (laporan)	1	1	5.000	6.000
b	SK: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (laporan)	1	1	50.000	55.000
c	SK: Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor (laporan)	1	1	655.000	660.000
4.6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis BMD terpeliharaan menunjang operasional dinas	1	1	120.000	122.000
a	SK: Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak, dan perijinan kendaran dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayar pajak dan perijinannya (unit)	5	5	79.000	79.000
b	SK: Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya terpelihara (unit)	2	2	35.000	36.000
c	SK: Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terpelihara/direhab (unit)	1	1	6.000	7.000

IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rancangan Penganggaran dan Indikator Kinerja

Dinas Perikanan dalam penyusunan rancangan anggaran pembangunan dengan melakukan pengkajian atas usulan partisipatif, teknokratik, dan asumsi politis sehingga antara rencana anggaran dan kinerja yang tertuang dalam rancangan Renstra tahun 2021-2026 dapat sinergis dengan rancangan RKPD dengan mempertimbangan juga dinamisasi lingkungan strategis. Adapun rancangan rumusan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah tahun 2023 yang disesuaikan dengan Kepmendagri 050 Tahun 2021 disajikan seperti berikut ini:

Tabel Rumusan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah tahun 2023

Program dan Kegiatan	Indikator kinerja	Target kinerja program dan pendanaan tahun 2023				Keterangan
		Target	Ranwal/Rp	Forum OPD	Ranhir	
Program pengelolaan perikanan budidaya	Prosentase peningkatan produksi perikanan budidaya	0,6%	427.000.000	447.552.000	447.552.000	
Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota	Jumlah tanda daftar bagi pembudi daya ikan kecil diterbitkan setahun	100 TDPIK	35.000.000	0	0	<i>Cross-cutting</i> Kegiatan dan sub kegiatan
Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah pokdakan produktif terbina	226 klp	202.000.000	254.000.000	254.000.000	
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah jenis teknologi yang dikaji terapkan menghasilkan teknologi adaptif	1 jenis	225.000.000	193.552.000	193.552.000	
Program pengelolaan perikanan tangkap	Prosentase peningkatan produksi perikanan tangkap	1,3%	322.144.000	322.144.000	322.144.000	
Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu)	Jumlah produksi perikanan tangkap di perairan umum	134,1 ton	18.000.000	310.144.000	310.144.000	<i>Cross-cutting</i> sub kegiatan
Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pembinaan pada KUB nelayan setahun	80 KUB	6.000.000	12.000.000	12.000.000	-
Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan	Jumlah armada nelayan skala kecil yang terlayani pendaftaran armadanya tangkanya	100 unit	6.000.000	0	0	<i>Cross-cutting</i> kegiatan dan sub kegiatan



Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota						
Program Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Prosentase peningkatan produksi produk olahan hasil perikanan	1,1%	525.000.000	344.700.000	344.700.000	--
Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah jenis ikan sebagai bahan baku olahan produk bernilai tambah dimanfaatkan	7 jenis	375.000.000	309.200.000	309.200.000	-
Pembinaan Mutudan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah poklhasr produkif terbina	68 klp	70.000.000	25.500.000	25.500.000	-
Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro Dan Kecil	Jumlah poklhasr yang dapat difasilitasi pendaftaran usaha pengolahan hasil perikanan setahun	1 unit usaha	60.000.000	10.000.000	10.000.000	-
Progam penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Prosentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tufoksi PD	100%	6.260.900.000	6.474.505.188		-
Prencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen SAKIP dihasilkan setahun	4 dok	7.000.000	7.000.000	7.000.000	-
Administrasi keuangan Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi keuangan diberikan setahun	12 bulan	5.272.900.000	5.491.768.500	5.491.768.500	-
Administrasi umum perangkat daerah	Jumlah jenis layanan perangkat daerah diberikan setahun	4 jenis	95.000.000	95.000.000	95.000.000	-
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jenis BMD disediakan menunjang operasional dinas	3 jenis	56.000.000	56.000.000	56.000.000	-
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis jasa penunjang kinerja pelayanan dinas	6 jenis	710.000.000	704.736.688	704.736.688	-
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis BMD terpeliharaan menunjang operasional dinas	1 jenis	120.000.000	120.000.000	120.000.000	-
Jumlah			7.042.544.000	7.588.901.188	7.588.901.188	

4.2 Sasaran Pembangunan

Pembangunan prioritas dirancang untuk memberikan kemanfaatan yang optimal pada sasarannya sehingga diharapkan anggaran berbasis kinerja. Adapun rancangan sasaran kegiatan prioritas dan usulan pendanaanya disajikan seperti berikut ini.



Tabel Sasaran Kegiatan dan Usulan Pendanaan

Kegiatan Prioritas	Sasaran	Kajian Teknis	Usulan pendanaan/Rp
Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota	-	Sesuai Kepmendagri 050/2021 indikator sub kegiatannya adalah mengelaurkan rekomendasi yang menjadi kewenangan provinsi, sehingga sub kegiatan ini <i>dicrosscating</i>	0
Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	UPR, BBI	Unit pembenihan ikan milik pemerintah yang tersebar di 4 unit BBI memerlukan saprokan dalam mendukung usaha pembenihan ikan sehingga dapat memberikan kontribusi pada PAD	254.000.000
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Pembudidaya ikan/Pokdakan	Belum semua pokdakan melaksanakan teknologi tepat guna dalam budidaya perikanan dan pengendalian kesehatan ikan dan lingkungan, sehingga CBIB belum optimal dalam menghasilkan komoditas unggulan daerah	193.552.000
Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu)	Nelayan/ KUB nelayan	Indikator sub kegiatan sesuai Kepmendagri 050/2021 adalah jumlah prasarana perikanan tangkap yang tersedia, dimana indikator tersebut tidak sesuai dengan rencana output sub kegiatan yaitu pemberian sarana perikanan tangkap sehingga dilakukan <i>crosscating</i>	310.144.000
Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Nelayan/ KUB nelayan, KUGAR	Pengurus dan anggota KUB nelayan laut dan nelayan pesisir kekurangan modal usaha dalam penyediaan armada dan API (alat penangkapan ikan) yang produktif	12.000.000
Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	-	Indikator sub kegiatan sesuai Kepmendagri 050/2021 adalah jumlah rekomendasi buku kapal perikanan yang diterbitkan, dimana indikator tersebut tidak menjadi kewenangan Dinas Perikanan Kabupaten untuk mengelaurkan rekomendasi buku kapal perikanan (BKP) tetapi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali sehingga dilakukan <i>crosscating</i>	0
Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	UKM / UPI, Poklhasar	Masih besarnya ketergantungan penyediaan bahan baku dari luar daerah untuk bahan baku olahan bagi UKM/poklhasar untuk menghasilkan produk perikanan berdaya saing	309.200.000
Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	UKM / UPI, Poklhasar, PKK	Belum semua UKM/poklhasar dan PKK memahami pentingnya ikan sebagai bahan pangan bergizi tinggi sehingga diperlukan sosialisasi, pelatihan, dan demo mengolah ikan	25.500.000
Penerbitan Tanda Daftar Usaha	UKM / UPI, Poklhasar,	Belum optimalnya pendataan pelaku usaha perikanan dalam penyusunan	10.000.000



Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro Dan Kecil	Pengepul	database yang dijadikan dasar perencanaan, promosi, dan pameran produk perikanan	
Pencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Aparatur	Belum optimalnya kualitas dokumen perencanaan, evaluasi, dan pelaporan kinerja sebagai tolok ukur indikator pembangunan perikanan	7.000.000
Administrasi keuangan Perangkat Daerah	Aparatur	Belum akuntabelnya pengelolaan keuangan sehingga memerlukan manajemen penatausahaan yang akurat	5.491.768.500
Administrasi umum perangkat daerah	Aparatur	Belum optimalnya pelayanan administrasi untuk mendukung reformasi birokrasi	95.000.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Aparatur	Masih kurangnya sarana kerja berbasis teknologi yang mendukung kinerja instansi berbasis TI	56.000.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Aparatur	Masih kurangnya jasa penunjang kelancaran administrasi perkantoran PD dan pelayanan tenaga non PNS	704.736.688
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Aparatur	Masih banyaknya sarana kerja dan sarana operasional yang rusak sehingga memerlukan biaya servis/ pemeliharannya	120.000.000

Hasil pengkajian terhadap sasaran pembangunan yang disinkronisasikan dengan sub kegiatan dan usulan pendanaannya disajikan seperti tabel berikut ini.

Tabel Sasaran dan Usulan Pendanaan

Sub Kegiatan Prioritas	Sasaran	Kajian Teknis	Usulan dana/Rp
Pelayanan penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Kepmendagri 050/2021 indikator sub kegiatannya adalah mengeluarkan rekomendasi yang menjadi kewenangan provinsi, sehingga sub kegiatan ini <i>dicrosscutting</i>	0
Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	UPR, BBI, Pokdakan	Pengautan kapasitas pembudidaya ikan kecil baik UPR dan pokdakan memerlukan pendampingan teknis dan administrasi dalam melaksanakan CPIP dan CBIB sehingga produktivitasnya dapat meningkat	202.000.000
Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	UPR, BBI, Pokdakan	Kelembagaan pokdakan yang masih lemah dalam manajemen (administrasi, pembukuan, keuangan) memerlukan pendampingan agar menjadi pokdakan yang produktif dan bankable	52.000.000
Penyediaan prasarana pembudiaya ikan dalam 1(satu) daerah kabupaten/kota	BBI, Pembudidaya ikan/ pokdakan	Lemahnya permodalan pembudidaya ikan memerlukan dukungan permodalan dan sarana prasarana produksi (saprokan) baik dari dukungan APBN maupun APBD	163.552.000
Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kelompok masyarakat, pokdakan	Tingginya partisipasi masyarakat melestarikan biota perairan dan menjaga kesehatan ikan dan lingkungan budidaya	30.000.000
Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	-	Indikator sub kegiatan sesuai Kepmendagri 050/2021 adalah jumlah prasarana perikanan tangkap yang tersedia, dimana indikator tersebut tidak sesuai dengan rencana output sub	0



		kegiatan yaitu pemberian sarana perikanan tangkap sehingga dilakukan <i>croscating</i>	
Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Nelayan, KUB nelayan.	Kemampuan penyediaan sarana perikanan tangkap ramah lingkungan di kalangan nelayan kecil sangat rendah sehingga diperlukan dukungan / bantuan dan pendampingan teknis	310.144.000
Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Nelayan, KUB nelayan. KUGAR	Permodalan usaha nelayan kecil dalam penyediaan armada tangkap dan alat tangkap serta operasional melaut sangat rendah sehingga diperlukan dukungan permodalan dari pihak lain.	6.000.000
Pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan kelompok nelayan kecil	KUB Nelayan	Pendampingan kelembagaan KUB nelayan kecil di 6 kecamatan pesisir sangat diperlukan dalam administrasi pengukuhan kelas kelompok agar nelayan mampu mengelola organisasi	6.000.000
Pelayanan Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran Sampai dengan 10 GT	-	Indikator sub kegiatan sesuai Kepmendagri 050/2021 adalah jumlah rekomendasi buku kapal perikanan yang diterbitkan, dimana indikator tersebut tidak menjadi kewenangan Dinas Perikanan Kabupaten untuk mengeluarkan rekomendasi buku kapal perikanan (BKP) tetapi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali sehingga dilakukan <i>croscating</i>	0
Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	UKM / UPI, Poklalsar	Diperlukan fasilitasi UKM/ poklalsar/ ibu PKK dalam penyediaan bahan baku (baik yang bersumber dari bahan baku lokal maupun dari luar daerah) untuk aneka olahan hasil perikanan bernilai tambah	309.200.000
Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	UKM / UPI, Poklalsar, PKK	Diperlukan pendampingan dan penyuluhan berkelanjutan kepada UKM/ polalsar dalam pemenuhan persyaratan berusaha seperti P,IRT, SIUP, SKP, dan lainnya agar administrasi usaha sesuai aturan	25.500.000
Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	UKM / UPI, Poklalsar, Pengepul	Pemutahiran data usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sangatlah diutuhkan oleh instansi dan stakeholder lainnya sesuai kebutuhan instansi terkait utamanya bagi pemerintah untuk satu data kelautan dan perikanan, neraca pangan, dan statistik perikanan	10.000.000
Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Aparatur	Peenyediaan dokumen perencanaan kinerja perangkat daerah yang akurat sangatlah vital dalam SAKIP dan SPIP agar kinerja instansi dapat akuntabel.	4.000.000
Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Aparatur	Akuntabilitas evaluasi dan pelaporan kinerja perangkat daerah sangatlah vital dalam SAKIP agar kinerja instansi terukur dan berorientasi hasil.	3.000.000
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Aparatur	Pemenuhan gaji dan tunjangan bagi PNS sesuai pangkat dan golongan dan kinerjanya sangatlah penting dalam mendorong prestasi kinerja PD	5.486.768.500
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Aparatur	Pemenuhan laporan keuangan yang tepat waktu dan akurat sangatlah dibutuhkan agar SAP dapat dilaksanakan sehingga OPD berkontribusi mencapai WTP	5.000.000
Penyediaan Komponen Instalasi	Aparatur	Penyediaan perlengkapan instalasi listrik untuk penerangan kantor sangatlah vital	3.000.000



Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		dalam operasional dan keamanan kantor	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Aparatur	Penyediaan peralatan kebersihan dan rumah tangga dinas sangatlah vital dalam operasional dan kenyamanan kedinasan	3.000.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Aparatur	Penyediaan bahan-bahan logistik kantor sangatlah vital dalam menunjang pelayanan publik	28.000.000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Aparatur	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan sangatlah vital dalam kelancaran administrasi perkantoran	8.000.000
Penyediaan bahan material	Aparatur	Penyediaan ATK dan lainnya sangatlah vital dalam menunjang kelancaran pelayanan administrasi kantor	19.000.000
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Aparatur	Mengikuti rapat koordinasi, konsultasi, desk dan lainnya sangatlah penting dalam sinkronisasi program dan kegiatan prioritas	34.000.000
Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Aparatur	Pengadaan sarana TI berupa laptop dan printer sangatlah vital dalam menunjang kelancaran TI kedinasan	56.000.000
Penyediaan jasa surat menyurat	Aparatur	Ketersediaan anggaran untuk materai dan pengiriman surat atau dokumen kedinasan sangatlah vital	5.000.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Aparatur	Ketersediaan anggaran untuk listrik, air, telepon, dan internet sangatlah vital dalam menunjang operasional pelayanan kedinasan, pengaduan, dan pelaporan	50.000.000
Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Aparatur	Penyediaan gaji tenaga Non PNS sangatlah vital dalam menunjang kinerja tenaga Non PNS dalam pelayanan administrasi dan pelayanan publik	630.191.400
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak, dan perijinan kendaran dinas operasional atau lapangan	Aparatur	Kendaraan dinas yang laak operasional dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut dibutuhkan samsat, servis, bahan bakar minyak, oil, dan lainnya	79.000.000
Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Aparatur	Servis laptop/ komputer, printer sebagai sarana kerja sangatlah vital dan penyediaan tinta/ isi ulang toner agar operasional administrasi dapat lancar	55.000.000
Pemeliharaan/rahabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Aparatur	Pemeliharaan gedung kantor rapat UPTD yang sudah rusak ringan dibutuhkan pemeliharaan dan cat tembok	6.000.000

V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Buku Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Tabanan Tahun 2023 merupakan dokumen yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaan evaluasi program-program pembangunan tahunan dan penyusunan Laporan Instansi pemerintah (LKjIP), dimana dalam TA. 2023 ini perencanaan sebagai tolok ukurnya adalah monitoring program/kegiatan, evaluasi rencana kinerja triwulanan, pencapaian 3 sasaran strategis, 3 Indikator Kinerja Utama, 4 indikator kinerja program pembangunan, 15 indikator kinerja kegiatan dan indikator sub kegiatan perikanan.

5.2 Saran

Dengan mempertimbangkan dinamisasi pembangunan perikanan kedepan yang selaras dengan adaptasi tatanan kehidupan baru (new normal), maka dipandang perlu selalu melakukan pencermatan dan analisis yang mendalam dalam upaya menyusun rencana kinerja yang selaras dan terintegrasi antara program Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan serta Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali dan program-program Pemerintah Kabupaten Tabanan sehingga dapat mewujudkan sasaran strategis OPD dengan lebih optimal.

Tabanan, 23 Juni 2022
Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten Tabanan



IMADE YUDIANA, ST., M.T
Pembina Utama Muda
NIP. 19690619 199803 1 005



L A M P I R A N R E N J A

1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksana Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 Kabupaten Tabanan
2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Tabanan
3. Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Kabupaten Tabanan
4. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan tahun 2023 melalui Dinas Perikanan Kabupaten Tabanan
5. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2023 pada Dinas Perikanan Kabupaten Tabanan
6. Program, Kegiatan, Sub kegiatan dan Pendanaan Tahun 2021-2026
7. Lampiran 7. Sinkronisasi Ranwal, Forum OPD, Ranhir, RKPD

Lampiran 1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 Kabupaten Tabanan

Kode	Urusan, Program, Kegiatan	Indikator kinerja	Target kinerja Renstra 2022	Target dan realisasi Tahun 2020			Target kinerja 2023	Perkiraan realisasi tahun berjalan 2023	
				Target 2021	Realisasi 2021	%		Realisasi	%
A	Program pengelolaan perikanan budidaya	Prosentase peningkatan produksi perikanan budidaya (%)	0,4%	0,2%	0,19%	95,0	0,6%	0,6%	100
1	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota	Jumlah tanda daftar bagi pembudi daya ikan kecil yang produktif diterbitkan setahun	100 TDPIK	100 TDPIK	50 TDPIK	50,0	-	-	-
2	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah pokdakan produktif terbina	216 klp	206 klp	211 klp	206,0	226 klp	226 klp	100
3	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah kaji terap teknologi produktif dihasilkan setahun	1 jenis	1 jenis	1 jenis	100,0	1 dokumen	1 dokumen	100
B	Program pengelolaan perikanan tangkap	Prosentase peningkatan produksi perikanan tangkap (%)	1,2%	1,1%	1,13%	102,7	1,3%	1,3%	100
1	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu)	Jumlah produksi perikanan tangkap di perairan umum setahun	130,1 ton	127,0 ton	126.03 ton	97,7	138,1 ton	138,1 ton	100
2	Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah KUB nelayan terbina produktif setahun	78 KUB	77 KUB	68 KUB	87,2	80 KUB	80 KUB	100
3	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran	Jumlah armada tangkap nelayan yang sudah diterbitkan	60 unit	0 unit	0 unit	-	-	-	-



	Sampai Dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	tanda daftar kapal perikanan skala kecil							
C	Program Pengolaan dan pemasaran hasil perikanan	Prosentase peningkatan produksi produk olahan hasil perikanan (%)	1,0%	0,9 %	1,0%	111,1	1,1%	1,1%	100
1	Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah jenis ikan sebagai bahan baku olahan produk bernilai tambah dimanfaatkan	5 jenis	4 jenis	4 jenis	100,0	7 jenis	7 jenis	100
2	Pembinaan Mutudan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah poklhasr produkif terbina	63 klp	60 klp	58 klp	96,6	68 klp	68 klp	100
3	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan BagiUsaha Skala Mikro Dan Kecil	Jumlah poklhasr yang dapat difasilitasi pendaftaran usaha pengolahan hasil perikanan setahun	1 unit usaha	1 unit usaha	1 unit usaha	100,0	1 unit usaha	1 unit usaha	100
D	Progam penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Prosentase layanan menunjang tugas pokok dan fusngi PD (%)	100%	100%	100%	100,0	100%	100%	100
1	Prencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen SAKIP dihasilkan setahun	4 dok	4 dok	4 dok	100,0	4 dok	4 dok	100
2	Administrasi keuangan Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi keuangan diberikan setahun	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100,0	12 bulan	12 bulan	100
3	Administrasi umum perangkat daerah	Jumlah jenis layanan perangkat daerah diberikan	4 jenis	4 jenis	4 jenis	100,0	4 jenis	4 jenis	100



Rencana Kerja

		setahun							
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jenis BMD disediakan menunjang operasional dinas	3 jenis	3 jenis	3 jenis	100,0	3 jenis	3 jenis	100
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis jasa penunjang kinerja pelayanan dinas	6 jenis	6 jenis	6 jenis	100,0	6 jenis	6 jenis	100
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis BMD terpeliharaan menunjang operasional dinas	1 jenis	1 jenis	1 jenis	100,0	1 jenis	1 jenis	100



Tabanan, 23 Juni 2022
Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten Tabanan

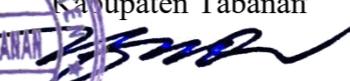
I MADE YUDIANA, ST., M.T
Pembina Utama Muda
NIP. 19690619 199803 1 005

Lampiran 2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Tabanan

No	Indikator	SPM	Indikator	Target renstra					Realisasi				Proyeksi		Catatan
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	-	-	Produksi ikan (ton)	4.072,1	4.194,3	4.362,1	4.580,1	4.731,5	3.991,7	4.089,7	3.797,0	3850.9	4.731,5	3886.5	Produksi budidaya dan tangkapan ikan
2	-	-	Konsumsi ikan (kg/kap/thn)	30,3	30,9	31,4	31,8	32,2	29,9	30,6	31,2	31.49	30,0	32,3	Konsumsi ikan masyarakat
3	-	-	Ekspor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tidak ada eksportir

Tabanan, 23 Juni 2022
 Kepala Dinas Perikanan
 Kabupaten Tabanan



I MADE YUDIANA, ST., M.T
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19690619 199803 1 005



Lampiran 3 a

A. Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Kabupaten Tabanan

No	Rancangan awal RKPD tahun 2023					Hasil analisa kebutuhan tahun 2023					Catatan
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target	Indikatif/Rp	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target	Kebutuhan/Rp	
A	Program pengelolaan perikanan budidaya	Kab. Tabanan	Prosentase peningkatan produksi perikanan budidaya	0,6%	272.000.000	Program pengelolaan perikanan budidaya	Kab. Tabanan	Prosentase peningkatan produksi perikanan budidaya	0,6%	447.552.000	
1	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota	Kab. Tabanan	Jumlah tanda daftar bagi pembudi daya ikan kecil diterbitkan setahun	100 klp	35.000.000	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota	Kab. Tabanan	Jumlah tanda daftar bagi pembudi daya ikan kecil diterbitkan setahun	-	0	Cruss cutting
2	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Kab. Tabanan	Jumlah pokdakan produktif terbina	226 klp	167.000.000	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Kab. Tabanan	Jumlah pokdakan produktif terbina	226 klp	254.000.000	
3	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Kab. Tabanan	Jumlah jenis teknologi yang dikaji terapkan menghasilkan teknologi adaktif	1 jenis	70.000.000	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Kab. Tabanan	Jumlah jenis teknologi yang dikaji terapkan menghasilkan teknologi adaktif	1 jenis	193.552.000	
B	Program pengelolaan perikanan tangkap	Kab. Tabanan	Prosentase peningkatan produksi perikanan tangkap	1,3%	30.000.000	Program pengelolaan perikanan tangkap	Kab. Tabanan	Prosentase peningkatan produksi perikanan tangkap	1,3%	322.144.000	
1	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang	10 kecamatan	Jumlah produksi perikanan tangkap di perairan umum	134,1 ton	18.000.000	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu)	10 kecamatan	Jumlah produksi perikanan tangkap di perairan umum	134,1 ton	310.144.000	



	Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu)										
2	Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota	6 kecamatan pesisir	Jumlah pembinaan pada KUB nelayan setahun	80 KUB	6.000.000	Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota	6 kecamatan pesisir	Jumlah pembinaan pada KUB nelayan setahun	80 KUB	12.000.000	
3	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	6 kecamatan pesisir	Jumlah armada tangkap nelayan yang sudah diterbitkan tanda daftar kapal perikanan skala kecil	100 unit	6.000.000	Pelayanan Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	6 kecamatan pesisir	Jumlah armada nelayan skala kecil yang terlayani pendaftaran armada tangkanya	-	-	Cruss cutting
D	Program Pengolaan dan pemasaran hasil perikanan	Kab. Tabanan	Prosentase peningkatan produksi produk olahan hasil perikanan	1,1%	525.000.000	Program Pengolaan dan pemasaran hasil perikanan	Kab. Tabanan	Prosentase peningkatan produksi produk olahan hasil perikanan	1,1%	344.700.000	
1	Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	10 kecamatan	Jumlah jenis ikan sebagai bahan baku olahan produk bernilai tambah dimanfaatkan	7 jenis	375.000.000	Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	10 kecamatan	Jumlah jenis ikan sebagai bahan baku olahan produk bernilai tambah dimanfaatkan	7 jenis	309.200.000	
2	Pembinaan Mutudan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan	10 kecamatan	Jumlah poklhasr produkif terbina	68 klp	70.000.000	Pembinaan Mutudan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro	10 kecamatan	Jumlah poklhasr produkif terbina	68 klp	25.500.000	



	dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil					dan Kecil					
3	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan BagiUsaha Skala Mikro Dan Kecil	10 kecamatan	Jumlah poklhasar yang dapat difasilitasi pendaftaran usaha pengolahan hasil perikanan setahun	1 klp	60.000.000	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan BagiUsaha Skala Mikro Dan Kecil	10 kecamatan	Jumlah poklhasar yang dapat difasilitasi pendaftaran usaha pengolahan hasil perikanan setahun	1 klp	10.00.000	
E	Progam penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Kab. Tabanan	Prosentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tufoksi PD	100%	6.256.900.000	Progam penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Kab. Tabanan	Prosentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tufoksi PD	100%	6.454.959.900	
1	Prencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kab. Tabanan	Jumlah jenis dokumen SAKIP dihasilkan setahun	4 dok	7.000.000	Prencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kab. Tabanan	Jumlah jenis dokumen SAKIP dihasilkan setahun	4 dok	7.000.000	
2	Administrasi keuangan Perangkat Daerah	Kab. Tabanan	Jumlah layanan administrasi keuangan diberikan setahun	12 bulan	35.000.000	Administrasi keuangan Perangkat Daerah	Kab. Tabanan	Prosentase serapan anggaran sesuai target	12 bulan	5.491.768.500	
1	Administrasi umum perangkat daerah	Kab. Tabanan	Jumlah jenis layanan administrasi umum diberikan setahun	4 jenis	167.000.000	Administrasi umum perangkat daerah	Kab. Tabanan	Jumlah jenis layanan administrasi umum diberikan setahun	4 jenis	95.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Tabanan	Jumlah jenis BMD diadakan menunjang kelancaran operasional dinas	3 jenis	272.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Tabanan	Jumlah jenis BMD diadakan menunjang kelancaran operasional dinas	3 jenis	56.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Tabanan	Jumlah jenis jasa penunjang administrasi disediakan setahun	6 jenis	35.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Tabanan	Jumlah jenis jasa penunjang administrasi disediakan setahun	6 jenis	685.191.400	



Rencana Kerja

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Tabanan	Jumlah jenis BMD terpelihara menunjang kelancaran pelayanan	1 jenis	167.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Tabanan	Jumlah jenis BMD terpelihara menunjang kelancaran pelayanan	1 jenis	120.000.000	
									7.509.355.900	

Tabanan, 23 Juni 2022

Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten Tabanan



Imade Yudianta
I MADE YUDIANA, ST., M.T
Pembina Utama Muda
NIP. 19690619 199803 1 005



Lampiran 4

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan tahun 2023 melalui Dinas Perikanan Kabupaten Tabanan

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan Penting
A	Program Pengelolaan perikanan budidaya	Kab. Tabanan	Prosentase peningkatan produksi perikanan budidaya	0,6%	
1	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Kab. Tabanan	Jumlah tanda daftar bagi pembudi daya ikan kecil diterbitkan setahun	-	Cruss cutting
2	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Kab. Tabanan	Jumlah pokdakan produktif terbina	226 klp	Diperlukan sarana produksi untuk produksi benih yang menghasilkan PAD dan benihnya dideder dan dibesarkan oleh pokdakan
3	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Kab. Tabanan	Jumlah jenis teknologi yang dikaji terapkan menghasilkan teknologi adaptif	1 jenis	Diperlukan sapras untuk mendukung kinerja pelayanan BBI sehingga kaji terap teknologi dapat dimanfaatkan
B	Program Pengelolaan perikanan tangkap	Kab. Tabanan	Prosentase peningkatan produksi perikanan tangkap	1,3%	
1	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu)	10 kecamatan	Jumlah produksi perikanan tangkap di perairan umum setahun	134,1 ton	Peengadaan sarana penangkapan ikan, pembinaan nelayan dan pemutahiran data statistik perikanan tangkap secara berkala
2	Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota	6 kecamatan pesisir	Jumlah pembinaan pada KUB nelayan setahun	80 KUB	Pemutahiran data nelayan dan pendampingan usaha nelayan agar menjadi bankable
3	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	6 kecamatan pesisir	Jumlah armada tangkap nelayan yang sudah diterbitkan tanda daftar kapal perikanan skala kecil	-	Cruss cutting
C	Program Pengolaan dan pemasaran hasil perikanan	Kab. Tabanan	Prosentase peningkatan produksi produk olahan hasil perikanan	1,1%	
1	Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	10 kecamatan	Jumlah poklhasar produkif terbina	7 jenis	Mendorog masyarakat gemar memproduksi berbagai produk olahan dan memasyarakatkan makan ikan
2	Pembinaan Mutudan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala	10 kecamatan	Jumlah jenis ikan sebagai bahan baku olahan produk bernilai tambah	68 klp	Mendampingi usaha poklhasar/UKM mikro menghasilkan produk bermutu dan terjamin



	Mikro dan Kecil		dimanfaatkan		kemanan pangannya
3	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro Dan Kecil	10 kecamatan	Jumlah poklhasar produkif terbina	1 klp	Pemutahiran populasi, RTP, dan produksi untuk menghasilkan data statistik yang akurat dan dimanfaatkan oleh publik
D	Progam penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Kab. Tabanan	Prosentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tufoksi PD	100%	
1	Prencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kab. Tabanan	Jumlah jenis dokumen SAKIP dihasilkan setahun	4 dok	Dibutuhkan dokumen SAKIP menunjang kinerja perangkat daerah
2	Administrasi keuangan Perangkat Daerah	Kab. Tabanan	Jumlah layanan administrasi keuangan yang diberikan setahun	12 bulan	Dibutuhkan laporan keuangan perangkat daerah yang akuntabel
3	Administrasi umum perangkat daerah	Kab. Tabanan	Jumlah jenis layanan administrasi umum diberikan setahun	4 jenis	Dibutuhkan dukungan anggaran administrasi menunjang kinerja pelayanan perangkat daerah
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Tabanan	Jumlah jenis BMD diadakan menunjang kelancaran operasional dinas	3 jenis	Dibutuhkan BMD / sarana kerja TI menunjang kelancaran administrasi
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Tabanan	Jumlah jenis jasa penunjang administrasi disediakan setahun	6 jenis	Dibutuhkan jasa penunjang pelayanan kinerja perangkat daerah
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Tabanan	Jumlah jenis BMD terpelihara menunjang kelancaran pelayanan	1 jenis	Dibutuhkan anggaran pemeliharaan sarana dan prasarana pernagkat daerah agar laik operasional

Tabanan, 23 Juni 2022

Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten TabananI MADE YUDIANA, ST., M.T
Pembina Utama Muda
NIP. 19690619 199803 1 005



Lampiran 5

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023 pada Dinas Perikanan Kabupaten Tabanan

No	Urusan, Program, Kegiatan	Indikator kinerja	Rencana tahun 2022				Catatan penting	Perkiraan maju tahun 2023	
			Lokasi	Target	Indikatif/Rp	Sumber		Target	Kebutuhan/Rp
A	Program Pengelolaan perikanan budidaya	Prosentase peningkatan produksi perikanan budidaya	Kab Tabanan	0,4%	473.000.000	APBD	-	0,6%	447.552.000
1	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah tanda daftar bagi pembudi daya ikan kecil diterbitkan setahun	Kab Tabanan	100 klp	17.000.000	APBD	-	-	0
2	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah pokdakan produktif terbina	Kab Tabanan	216 klp	192.000.000	APBD	-	226 klp	254.000.000
3	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah jenis teknologi yang dikaji terapkan menghasilkan teknologi adaptif	Kab Tabanan	1 jenis	264.000.000	APBD, DAK	-	1 jenis	193.552.000
B	Program Pengelolaan perikanan tangkap	Prosentase peningkatan produksi perikanan tangkap	Kab Tabanan	1,2%	136,000,000	APBD	-	1,3%	322.144.000
1	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu)	Jumlah pembinaan pada KUB nelayan setahun	Kab Tabanan	130,4 ton	125,000,000	APBD, DAK	-	134,1 ton	310.144.000
2	Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah nelayan dan penggaram yang memanfaatkan modal dari LK	Kab Tabanan	79 KUB	5.000.000	APBD	-	80 KUB	12.000.000



3	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah armada tangkap nelayan yang sudah diterbitkan tanda daftar kapal perikanan skala kecil	6 Kecamatan pesisir	75 unit	6.000.000	APBD	-	-	-
C	Program Pengolaan dan pemasaran hasil perikanan	Prosentase peningkatan produksi produk olahan hasil perikanan	Kab Tabanan	1,0%	32.500.000	APBD	-	1,1%	344.700.000
1	Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah jenis ikan sebagai bahan baku olahan produk bernilai tambah dimanfaatkan	Kab Tabanan	6 jenis	12.000.000	APBD	-	7 jenis	309.200.000
2	Pembinaan Mutudan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah poklhasar produkif terbina	Kab Tabanan	65 klp	10.500.000	APBD	-	68 klp	25.500.000
3	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan BagiUsaha Skala Mikro Dan Kecil	Jumlah poklhasar produkif terbina	Kab Tabanan	1 klp	10.000.000	APBD	-	1 klp	10.00.000
D	Progam penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Prosentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tufoksi PD	Kab Tabanan	100%	6,290,165,685	APBD	-	100%	6.454.959.900
1	Prencanaan,	Jumlah jenis dokumen	Kab Tabanan	4 dok	3.600.000	APBD	-	4 dok	7.000.000



	penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	SAKIP dihasilkan setahun							
2	Administrasi keuangan Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi keuangan yang diberikan setahun	Kab Tabanan	12 bulan	5.489.268.500	APBD	-	12 bulan	5.491.768.500
3	Administrasi umum perangkat daerah	Jumlah jenis layanan administrasi umum diberikan setahun	Kab Tabanan	4 jenis	50,056,445	APBD	-	4 jenis	95.000.000
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jenis BMD diadakan menunjang kelancaran operasional dinas	Kab Tabanan	3 jenis	0	APBD	-	3 jenis	56.000.000
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis jasa penunjang administrasi disediakan setahun	Kab Tabanan	6 jenis	693,222,600	APBD	-	6 jenis	685.191.400
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis BMD terpelihara menunjang kelancaran pelayanan	Kab Tabanan	1 jenis	54,018,140	APBD	-	1 jenis	120.000.000

Tabanan, 23 Juni 2022

Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten Tabanan



I MADE YUDIANA, ST., M.T
Pembina Utama Muda
NIP. 19690619 199803 1 005



Lampiran 7
Program, Kegiatan, Sub kegiatan dan Pendanaan Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Awal RPJMD	Taret Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun ke-										Kondisi RPJMD		Unit	Lokasi
						2021		2022		2023		2024		2025		Target	Rp juta		
						Target	Rp juta	Target	Rp juta	Target	Rp juta	Target	Rp juta	Target	Rp juta				
Meningkatkan konsumsi ikan masyarakat	Meningkatnya produksi perikanan	I	Program Pengelolaan perikanan budidaya	Prosentase peningkatan produksi perikanan budidaya (%)	0,1	0,2	915.0	0,4	239.0	0,6	272.0	0,8	300.0	1,0	350	1,1	380.0	Diskan	Kab Tabanan
		I.1	Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota	Jumlah tanda daftar bagi pembudi daya ikan kecil yang produktif diterbitkan setahun	0.0	95.0	357	100.0	31	100.0	35	100	38	100	40	100	50	Diskan	Kab Tabanan
		a	SK: Pelayanan penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/Kota	Jumlah pokdakan yang dilayani TDPIK setahun	0.0	95	37	100	31	105	35	110	38	115	40	120	50		
		I.2	Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah pokdakan produktif terbina (klp)	194.0	206.0	142.0	216.0	150.0	226.0	167	236.0	175	246	185	256	195	Diskan	Kab Tabanan
		a	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah produksi benih ikan setahun (ribu ekor)	16407	16380	142	16440	150	16546	167	16702	175	16900	185	17115	195		
		b	SK : Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah kelompok pembudidaya ikan kecil yang mengikuti pembentukan dan pengembangan kelembagaan (klp)	0	0	0	0	0	35	35	37	38	39	40	41	50		
		I.3	Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah kaji terap teknologi produktif dihasilkan setahun	1	1	416	1	58	1	70	1	87	1	120	1	135	Diskan	Kab Tabanan
		a	SK: Penyediaan prasarana pembudiayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah jenis prasarana budidaya ikan disediakan setahun	2	2	416	2	50	2	70	2	87	2	120	2	135		
		b	SK : Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis lingkungan perikanan yang dijaga	4	5	0	5	60	5	65	5	70	5	75	5	80	Diskan	
		II	Program pengelolaan	Prosentase	1,0	1,1	583	1,2	25	1,3	30	1,4	35	1,5	40	1,6	45	Diskan	Kab Tabanan



			perikanan tangkap	peningkatan produksi perikanan tangkap (%)															
		2.1	Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu)	Jumlah produksi perikanan tangkap di perairan umum setahun	126.0	127.1	577	130.4	15	134.1	18	138.1	20	142,2	25	151	28	Diskan	Kab Tabanan
		a	SK: Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah jenis sarana perikanan tangkap ramah lingkungan disediakan	3	3	577	3	15	3	18	3	20	3	25	4	28		
		2.2	Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah KUB nelayan terbina produktif setahun	77	78	5	79	5	80	6	81	7	82	7	83	8	Diskan	Kab Tabanan
		a	SK: Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah jenis sarana perikanan tangkap ramah lingkungan disediakan	3	3	577	3	15	-	-	-	-	-	-	-	-	Recofu sing	
			SK : Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah sarana perikanan tangkap yang terjamin dan tersedia	0	0	0	0	0	3	180	3	200	3	205	4	208		
		2.3	Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah armada tangkap nelayan yang sudah diterbitkan tanda daftar kapal perikanan skala kecil	0.0	-	0	75.0	5.0	95.0	6	115	8	135.0	8	150.0	9	Diskan	Kab Tabanan
		a	SK: Pelayanan Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah armada nelayan skala kecil yang terlayani pendaftaran armada tangkapnya	0	0	0	75	5	95	6	115	8	135	8	150	9		
		III	Program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	Prosentase desa yang memiliki pokmaswas produktif (%)	8,3	8,3	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Recofu sing	Kab Tabanan
		3.1	Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan	Jumlah lokasi perikanan air tawar yang terawasi stok biota perairan setahun	3	3	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Recofu sing	Kab Tabanan



			Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/ Kota																
		a	SK: Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah desa yang melaksanakan penumbuhan stok biota perikanan	32	32	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Recofusing	
	Meningkatnya daya saing produk olahan hasil perikanan	IV	Program Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Prosentase peningkatan produksi produk olahan hasil perikanan (%)	0,8	0,9	470	1,0	500	1,1	505	1,2	555	1,3	650	1,4	690	Diskan	Kab Tabanan
		4.1	Kegiatan Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah jenis ikan sebagai bahan baku olahan produk bernilai tambah dimanfaatkan	4.0	5	360	6	375	7	375	8	395	9	430	10	450	Diskan	Kab Tabanan
		a	SK:Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis ikan yang disosialisasikan untuk peningkatan konsumsi ikan masyarakat	4	4	360	4	375	4	375	4	395	4	430	5	450		
		4.2	Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah poklhasr produkif terbina	60	63	65	65	70	68	70	70	85	73	120	74	130	Diskan	Kab Tabanan
		a	SK: Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah jenis ikan sebagai bahan baku olahan produk bernilai tambah dimanfaatkan	7	7	65	7	70	7	70	7	85	7	120	8	130		
		4.3	Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro Dan Kecil	Jumlah poklhasr yang dapat difasilitasi pendaftaran usaha pengolahan hasil perikanan setahun	1.0	1	45	1	55	1	60	1	75	1	100	1	110	Diskan	Kab Tabanan



		a	SK: Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah database kelompok perikanan yang terupdate setiap tahun	1	1	45	1	55	1	60	1	75	1	100	1	110		
Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Perikanan	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Perikanan	V	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Prosentase layanan menunjang tugas pokok dan fungsi PD (%)	100	100	6.256,9	100	6.256,9	100	6.256,9	100	6.838,7	100	7.036,7	100	7.236,7	Diskan	Kab Tabanan
		5.1	Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen SAKIP dihasilkan setahun	4.0	4	5	4	6	4	7	4	8	4	9	4	10	Diskan	Kab Tabanan
		a	SK: Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan kinerja dihasilkan setahun	2	2	3	2	3.5	2	4	2	4	2	5	2	5.5		
		b	SK: Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi dan laporan kinerja dihasilkan setahun	2	2	2	2	2.5	2	3	2	4	2	4	2	4.5		
		5.2	Kegiatan Administrasi keuangan Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi keuangan diberikan setahun	12	12	5.294,9	12	5.257,9	12	5.267,9	12	5.831,7	12	6.011,7	12	6.193,7	Diskan	Kab Tabanan
		a	SK: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah layanan gaji dan tunjangan ASN setahun	12	12	5442,9	12	5434,9	12	5482,9	12	5502,7	12	5522,7	12	5542,7		
		b	Koordinasi dan SK: Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah jenis laporan keuangan dihasilkan setahun	4	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5		
		5.3	Kegiatan Administrasi umum perangkat daerah	Jumlah jenis layanan perangkat daerah diberikan setahun	4.0	4.0	92	4.0	93	4.0	96	4.0	98	4.0	100.0	4.0	102.0	Diskan	Kab Tabanan
		a	SK: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan kantor tersedia	4	4	2	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3		
		b	SK: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Jumlah jenis alat kebersihan tersedia setahun	9	9	3	9	3	9	3	9	4	9	4	9	5		
		c	SK: Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor disediakan setahun	8	8	27	8	27	8	28	8	29	8	29	8	29		
		d	SK: Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang dicetak dan digandakan	6	6	7	6	7	6	8	6	9	6	9	6	10		
		e	SK: Penyediaan bahan	Jumlah jenis alat tulis	18	18	19	18	19	18	19	18	20	18	21	18	21		



		material	kantor tersedia setahun															
	f	SK: Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah layanan koordinasi ke luar daerah setahun	12		33		33		34		34		35		35		
	5.4	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jenis BMD disediakan menunjang operasional dinas	3	3	50	3	52	3	56	3	59	3	62	3	65	Diskan	Kab Tabanan
	A	SK: Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah jenis peralatan kantor tersedia setahun	3	3	50	3	52	3	56	3	59	3	62	3	65		
	5.5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis jasa penunjang kinerja pelayanan dinas	6.0	6.0	700	6.0	701	6.0	710	6.0	720	6.0	730.0	6.0	740.0	Diskan	Kab Tabanan
	a	SK: Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah layanan surat menyurat mendukung kelancaran administrasi dinas setahun	12	12	4	12	4	12	5	12	6	12	7	12	8		
	b	SK: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah rekening terbayar setahun	3	3	48	3	48	3	50	3	55	3	59	3	64		
	c	SK: Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah layanan administrasi keuangan bagi tenaga non PNS ddbayarkan setahun	12	12	648	12	649	12	655	12	660	12	665	12	670		
	5.6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis BMD terpeliharaan menunjang operasional dinas	1	1	116	1	117	1	120	1	122	1	124	1	126	Diskan	Kab Tabanan
	a	SK: Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak, dan perijinan kendaran dinas operasional atau lapangan	Jumlah jenis kendaraan dinas terpelihara setahun (jenis)	5	5	78	5	78	5	79	5	79	5	80	5	80		
	b	SK: Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah jenis peralatan kerja layak operasional (jenis)	4	4	33	4	34	4	35	4	36	4	37	4	38		
	c	SK: Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor terpelihara setahun (jenis)	1	1	5	1	5	1	6	1	7	1	7	1	8		



Rencana Kerja



Lampiran 7

Visi : Nangun Sat Kerthi Loka Bali Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana di Kabupaten Tabanan Menuju Tabanan Era Baru : Aman, Unggul, Madani (AUM)”

Misi 1 : Mewujudkan masyarakat Tabanan yang aman dan nyaman dalam perikehidupan (Aman)

Misi 2 : Membangun masyarakat Tabanan yang memiliki kemampuan dan berdaya saing tinggi di segala bidang kehidupan (Unggul)

Misi 3 : Mewujudkan masyarakat Tabanan yang memiliki kemandirian secara sosial-ekonomi di berbagai bidang yang berkepribadian dalam kebudayaan (Madani)

Tujuan, sasaran	Indikator	Strategi	Arah Kebijakan Tahunan					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
<p><u>Tujuan</u> : Meningkatkan konsumsi ikan masyarakat</p> <p><u>Sasaran</u> : Meningkatkan produksi perikanan</p>	<p><u>Indikator</u> : Tujuan : Tingkat konsumsi ikan</p> <p><u>Indikator</u> : Sasaran : Prosentase peningkatan produksi perikanan</p>	Memberdayakan usaha perikanan budidaya	1). Meningkatkan kualitas induk ikan bermutu dan unggul, 2). Revitalisasi lahan budidaya ikan agar lebih produktif 3). Pengendalian hama dan penyakit ikan 4). Memperkuat unit penghasil PAD	1). Meningkatkan produksi benih ikan bermutu dan unggul, 2). Manajemen pengelolaan air di lahan budidaya ikan 3). Pengendalian lingkungan 4). Memperkuat unit penghasil PAD	1). Meningkatkan cara pembenihan ikan yang baik, 2). Meningkatkan cara budidaya ikan yang baik 3). Pengendalian hama dan penyakit ikan 4). Memperkuat unit penghasil PAD	1). Meningkatkan kemampuan pembenih ikan agar bersertifikat CPIB, 2) Meningkatkan kemampuan pembudidaya ikan agar bersertifikat CBIB 3). Pengendalian hama dan penyakit ikan 4). Memperkuat unit penghasil PAD	1). Mengebangkan benih ikan unggul, 2). Mengembangkan komoditas rintisan daerah dan komoditas unggulan daerah 3). Pengendalian hama dan penyakit ikan 4). Memperkuat unit penghasil PAD	1). Menjadikan Tabanan sentra produksi benih ikan air tawar, 2). Menjadikan Tabanan kampung ikan air tawar 3). Pengendalian hama dan penyakit ikan, 4). Memperkuat unit penghasil PAD
		Memberdayakan usaha perikanan	1). Menotorisasi	1). Pengembangan	1). Penataan tempat	1). Penanganan	1). Regenerasi nelayan, 2).	Pemutahiran dokumen



Rencana Kerja

kinerja Dinas Perikanan <u>Sasaran</u> : Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Perikanan	SAKIP <u>Indikator</u> <u>Sasaran</u> : Nilai LKjIP	Perikanan						
---	--	-----------	--	--	--	--	--	--

Lampiran 8
 SINKRONISASI RANWAL, FORUM OPR, RANHIR, DAN RKPD

Program dan Kegiatan	Indikator kinerja	Target kinerja program dan pendanaan tahun 2023				Rancangan RKPD
		Target	Ranwal/Rp	Forum OPD	Ranhir	
Program pengelolaan perikanan budidaya	Prosentase peningkatan produksi perikanan budidaya	0,6%	427.000.000	447.552.000	447.552.000	527.552.000
Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah tanda daftar bagi pembudi daya ikan kecil diterbitkan setahun	100 TDPIK	35.000.000	0	0	0
Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah pokdakan produktif terbina	226 klp	202.000.000	254.000.000	254.000.000	273.552.000
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah jenis teknologi yang dikaji terapkan menghasilkan teknologi adaptif	1 jenis	225.000.000	193.552.000	193.552.000	193.552.000
Program pengelolaan perikanan tangkap	Prosentase peningkatan produksi perikanan tangkap	1,3%	24.000.000	322.144.000	322.144.000	337.144.000
Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu)	Jumlah produksi perikanan tangkap di perairan umum	134,1 ton	18.000.000	310.144.000	310.144.000	3.25.144.000
Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pembinaan pada KUB nelayan setahun	80 KUB	6.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000
Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah armada nelayan skala kecil yang terlayani pendaftaran armada tangkanya	100 unit	6.000.000	0	0	0
Program Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Prosentase peningkatan produksi produk olahan hasil perikanan	1,1%	525.000.000	344.700.000	344.700.000	535.500.000
Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah jenis ikan sebagai bahan baku olahan produk bernilai tambah dimanfaatkan	7 jenis	375.000.000	309.200.000	309.200.000	500.000.000
Pembinaan Mutudan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah poklhasr produkif terbina	68 klp	70.000.000	25.500.000	25.500.000	25.500.000
Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro Dan Kecil	Jumlah poklhasr yang dapat difasilitasi pendaftaran usaha pengolahan hasil perikanan setahun	1 unit usaha	60.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000



Rencana Kerja

Progam penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Prosentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tufoksi PD	100%	6.260.900.000	6.474.505.188	6.474.545.288	6.454.959.900
Pencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen SAKIP dihasilkan setahun	4 dok	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
Administrasi keuangan Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi keuangan diberikan setahun	12 bulan	5.272.900.000	5.491.768.500	5.491.768.500	5,088,397,432
Administrasi umum perangkat daerah	Jumlah jenis layanan perangkat daerah diberikan setahun	4 jenis	95.000.000	95.000.000	95.000.000	95.000.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jenis BMD disediakan menunjang operasional dinas	3 jenis	56.000.000	56.000.000	56.000.000	56.000.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis jasa penunjang kinerja pelayanan dinas	6 jenis	710.000.000	704.736.688	704.736.688	685.191.400
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis BMD terpeliharaan menunjang operasional dinas	1 jenis	120.000.000	120.000.000	120.000.000	120.000.000
Jumlah			7.042.544.000	7.588.901.188	7.588.901.188	6,076,397,432

Tabanan, 12 Juli 2022

Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten Tabanan



I MADE YUDIANA, ST., M.T

Pembina Utama Muda

NIP. 19690619 199803 1 005



Rencana Kerja